



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH  
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VII DPR RI DENGAN DIRJEN  
MINERBA KEMENTERIAN ESDM RI**

- Tahun Sidang : 2023-2024  
Masa Persidangan : II  
Rapat ke- : ...  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari, Tanggal : Senin, 6 November 2023  
Waktu : Pukul 13.50 WIB s.d.16.10 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi VII DPR RI  
Gd. Nusantara I Lantai 1  
Ketua Rapat : Sugeng Suparwoto/F-P. Nasdem  
Sekretaris Rapat : Dwiyanti, S. Sos.  
Kepala Bagian Sekretariat Komisi VII DPR RI  
Acara : 1. Tindak Lanjut RKAB 2023 dan 2024,  
2. Laporan Mekanisme RKAB,  
3. Lain-lain  
Hadir : 21 orang Anggota hadir dari 52 orang Anggota  
Komisi VII DPR RI dengan rincian sebagai berikut:

**A. Anggota DPR RI:**

**PIMPINAN:**

1. Sugeng Suparwoto/F-Nasdem/Ketua Komisi VII DPR RI
2. Bambang Haryadi, S.E./F-Gerindra/Wakil Ketua Komisi VII DPR RI
3. H. Eddy Soeparno, S.H., M.H./F-PAN/Wakil Komisi VII DPR RI

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA  
PERJUANGAN:**

3 orang anggota dari 10 anggota:

1. H. Yulian Gunhar, S.H, M.H.
2. H. Nasyirul Falah Amru, S.E.

3. Dr. Ir. Willy Midel Yoseph, M.M.

**2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:**

3 orang anggota dari 7 anggota:

1. Drs. Mukhtarudin
2. Bambang Hermanto, S.E.
3. Bambang Patijaya, S.E., M.M.

**3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:**

1 orang anggota dari 6 anggota:

1. Dr. Ramson Siagian.

**4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:**

1 orang anggota dari 5 anggota:

1. Rico Sia

**5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:**

1 orang anggota dari 5 anggota:

1. Hj. Ratna Juwita Sari, S.E, M.M.

**6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:**

1 orang anggota dari 5 anggota:

1. Sartono Hutomo

**7. FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera:**

1 orang anggota dari 5 anggota:

1. H. Nurhasan Zaidi, S.Sos.I.

**8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:**

1 orang anggota dari 3 anggota:

1. H. Nasril Bahar, S.E.

**2 FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:**

0 orang anggota dari 1 anggota:

**B. PEMERINTAH/UNDANGAN**

1. Letjen. TNI (Mar) (Purn) Bambang Suswantono, S.H., M.H., M.TR.(HAN) (Plt. Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI)

**JALANNYA RAPAT:**

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM):**

Rapat Dengar Pendapat atau RDP Komisi VII DPR RI dengan Plt. Dirjen Minerba Kementerian ESDM. *Monggo.* Baiklah.

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Salam sejahtera kami sampaikan,  
*Om swastiastu,*  
*Namo buddhaya,*  
Salam kebajikan,  
Rahayu.

Bapak-Ibu yang kami hormati,  
Yang kami hormati, Pimpinan Komisi VII DPR RI, ini hadir nanti Pak Bambang dan Pak Dony Oekon dan *Insyallah* Pak Maman dan juga Pak Edi.  
Yang kami hormati, Bapak dan Ibu Anggota Komisi VII DPR RI, dan ini sudah kuorum, dan sudah *bareng* tentu yang kami hormati Pelaksana Tugas Dirjen Minerba Mineral dan Batubara atau Minerba Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, beserta jajarannya.

Pertama, pasti kita semuanya bersyukur kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* Tuhan Yang Maha Kuasa, kita telah dikaruniai nikmat sehat *wal'afiat*, sehingga kita bersama dapat menyelenggarakan rapat yang sebagaimana tuntutan tugas kita bagaimana menjalankan konstitusi.

Bapak-Ibu yang kami hormati.

Sesuai dengan undangan yang telah disampaikan, bahwa dalam rapat kali ini, pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024, Komisi VII akan melaksanakan rapat dengar pendapat atau RDP dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan dengan agenda sebagai berikut:

1. Tindak Lanjut RKAB atau Rencana Kerja Anggaran dan Belanja 2023 dan 2024,
2. Laporan mekanisme pemberian persetujuan RKAB menjadi 3 tahun. Saya kira semuanya kita sepakat dalam berbagai rapat, kita menyarankan bahkan menyimpulkan Komisi VII waktu itu bahwa RKAB yang selama ini 1 tahun menjadi 3 tahun, dan
3. Lain-lain.

Bapak-Ibu yang kami hormati,

Berdasarkan data sekretariat, Anggota Komisi VII DPR RI yang telah hadir berjumlah 14 anggota dari 52 anggota, yang terdiri dari 7 fraksi dari 9 fraksi yang ada. Dengan demikian, kuorum sebagaimana ditentukan dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Pasal 281 Ayat (1) telah terpenuhi.

Bapak-Ibu yang kami hormati.

Sesuai peraturan, ketentuan Pasal 276 ayat (1) menyatakan bahwa setiap rapat DPR bersifat terbuka kecuali dinyatakan tertutup. Oleh karena itu,



pimpinan meminta persetujuan anggota agar rapat ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan dan bersifat terbuka. Apakah disetujui?

**(RAPAT: SETUJU)**

Baiklah Bapak-Ibu sekalian, atas persetujuan Anggota Komisi VII DPR RI, dan dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, dengan demikian rapat atau RDP dengan Plt. Dirjen Minerba Kementerian ESDM Republik Indonesia dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 13.50 WIB)  
(KETOK PALU 1 KALI)**

Bapak-Ibu yang kami hormati,

Sebelum melanjutkan rapat ini, kami meminta persetujuan agar rapat ini berlangsung kurang lebih 2 jam sejak dimulai rapat ini, setuju Bapak-Ibu sekalian?

**(RAPAT: SETUJU)  
(KETUK PALU 1 KALI)**

Baiklah, Bapak-Ibu yang kami hormati,

Rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) adalah rencana kerja dan anggaran biaya pada kegiatan usaha pertambangan, mineral, dan batubara yang meliputi aspek pengusahaan, aspek teknik dan aspek lingkungan. Jika sebelumnya durasi RKAB untuk kegiatan operasi produksi hanya 1 tahun, maka melalui Permen ESDM Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan RKAB serta tata cara pelaporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral, khususnya Pasal 3 ayat (1) huruf b di mana durasi RKAB menjadi 3 tahun.

Hal ini tentunya menjadi terobosan yang diharapkan memberi dampak positif bagi pengembangan industri pertambangan di dalam negeri. Namun demikian, kebijakan penambahan durasi RKAB 3 tahun tersebut hendaknya dibarengi juga dengan penyederhanaan proses pengajuannya, serta perbaikan sistem informasi atau e-RKAB.

Saat ini, masih terdapat beberapa perusahaan pemegang IUP, khususnya yang telah beroperasi, telah operasi produksi yang masih terkendala dalam memperoleh persetujuan RKAB. Sehingga dengan terbitnya Permen ESDM Nomor 10 Tahun 2023 tersebut diharapkan kendala-kendala yang selama ini dialami dapat teratasi.

Berkaitan dengan hal tersebut, RDP pada hari ini, Komisi VII DPR RI ingin memperoleh penjelasan dari Plt. Dirjen Minerba Kementerian ESDM



yang berkaitan dengan tindak lanjut RKAB 2023-2024 dan bagaimana mekanisme pemberian persetujuan RKAB menjadi tiga tahun sebagaimana diatur dalam Permen ESDM Nomor 10 Tahun 2023 tersebut.

Selanjutnya untuk efektifnya rapat RDP ini, kami persilakan, kami berikan kesempatan kepada dirjen, maaf kepada Plt. Dirjen Minerba Kementerian ESDM untuk menyampaikan pemaparan dan penjelasannya.

Kami persilakan Pak Plt. Dirjen.

**PLT. DIRJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDM RI (LETJEN. TNI (MAR) (PUKN) BAMBANG SUSWANTONO, S.H., M.H., N.TR.(HAN), CGCAE):**

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Selamat siang,  
Salam sejahtera untuk kita semuanya,  
*Shalom,*  
*Om swastiastu.*

Yang terhormat Pimpinan rapat, dalam hal ini Ketua Komisi Pak Sugeng Suparwoto,  
Yang kami hormati, Wakil Ketua Pak Bambang Haryadi,  
Yang kami hormati, Bapak-bapak Anggota Komisi VII DPR RI, serta  
Para hadirin sekalian.

Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas perkenan-Nya atas kesempatan siang ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan amanah konstitusi, yaitu rapat dengar pendapat atau RDP dengan agenda:

1. Tindak lanjut tentang RKAB 2023, dan
2. Laporan mekanisme RKAB.

Pimpinan dan Anggota Komisi VII yang kami hormati.

Berikut kami sampaikan pelaksanaan persetujuan RKAB di bidang mineral tahun 2023, sebagai berikut, kami awali dari bidang mineral.

Yang pertama, jumlah izin usaha pertambangan (IUP) *update* per tanggal 1 November, sebanyak 752 IUP. Selanjutnya jumlah permohonan RKAB atau Perubahan RKAB komoditas mineral tahun 2023 sebanyak 752 permohonan. Adapun rinciannya sebagai berikut:

1. Permohonan yang telah disetujui sebanyak 444 permohonan.
2. Kemudian permohonan yang masih *pending* atau dalam proses persetujuan sebanyak 200 permohonan. Saat ini sedang dilakukan di evaluasi sesuai ketentuan Kepmen ESDM No.1806 Tahun 2018

terhadap 200 permohonan, dan ini yang sudah kami godok Pak, kira-kira tiga minggu yang lalu dan sampai sekarang masih dalam proses persetujuan.

3. Selanjutnya belum menyampaikan kembali dokumen perbaikan sebanyak 113 permohonan.
4. Terdapat 37 badan usaha yang belum menyampaikan RKAB tahun 2023. Juga terhadap 446 persetujuan RKAB yang telah diterbitkan, yang dievaluasi dengan cara simplifikasi, sebelum permasalahan Mandiodo yang lalu. Akan dilakukan evaluasi kembali untuk melengkapi hasil evaluasi sebelumnya dengan menyesuaikan ketentuan yang ada di dalam Kepmen ESDM No. 1806 Tahun 2018 atau usulan pelaksanaan pada minggu ke-2 bulan November 2023, rencana selama dua minggu bersamaan dengan evaluasi RKAB tahun 2024, 2025, dan 2026.

Selanjutnya sebagaimana penjelasan sebelumnya, di mana terdapat sebanyak 200 permohonan yang masih dalam proses evaluasi, yang terdiri dari 158 permohonan yang mengajukan persetujuan RKAB dan ada 42 permohonan yang mengajukan persetujuan perubahan RKAB. Setelah dilaksanakan proses evaluasi, dilanjutkan dalam rapat pleno dari 200 total badan usaha yang ada dalam daftar undangan rapat pleno, terdapat 189 badan usaha yang hadir dan 11 badan usaha yang belum menghadiri rapat. Terdapat 4 badan usaha yang sudah dalam proses nota dinas dan 23 badan usaha yang sedang dalam tahap paraf eselon II atau surat dinas.

Dari hasil evaluasi persetujuan RKAB atau persetujuan perubahan RKAB, terdapat 9 permohonan yang disetujui dan 1 permohonan ditolak. Alasan penolakan permohonan dikarenakan perusahaan merencanakan kegiatan di kawasan hutan, namun belum memiliki IPPKH.

Saat ini, Ditjen Minerba sedang melakukan peninjauan kembali dokumen perbaikan pasca rapat pleno dan penyusunan draf persetujuan atau draf penolakan. Terdapat dua opsi rencana pelaksanaan evaluasi persetujuan RKAB mineral tahun 2024, sebagai berikut:

- Opsi pertama, melakukan evaluasi RKAB secara manual dengan mekanisme yang sama dengan percepatan evaluasi RKAB tahun 2023.
- Kemudian opsi yang kedua, melakukan evaluasi RKAB melalui e-RKAB yang saat ini masih dalam proses perbaikan, belum selesai.

Adapun jumlah IUP yang terdaftar di MODI saat ini, sebanyak 713 IUP komoditas mineral logam dan 39 IUP komoditas mineral bukan logam. Data dapat berubah sesuai dengan kemungkinan berikut:

1. Terdapat IUP yang berakhir masa berlakunya, kemudian
2. Terdapat IUP yang memperoleh izin peningkatan tahap pemulihan dari pencabutan atau baru terdaftar di MODI.



Mohon maaf, Pimpinan dan Anggota Komisi VII yang kami hormati.

Berikut kami sampaikan update pelaksanaan persetujuan RKAB atau perubahan RKAB batubara pada tahun 2023, yaitu sebagai berikut:

Update persetujuan RKAB di tahun 2023

- Permohonan yang masuk sebanyak 948 permohonan,
- Kemudian telah disetujui sebanyak 890 permohonan,
- Ditolak sebanyak 51 permohonan,
- Permohonan yang dikembalikan tidak ada, dan
- Sisa saldo permohonan sebanyak 7 permohonan.

Alasan penolakan terhadap 51 permohonan itu macam-macam, sebagai berikut:

- 15 permohonan ditolak karena *Competent Person* Indonesia,
- Kemudian 9 permohonan ditolak karena dokumen *feasibility study* dan AMDAL,
- 1 permohonan ditolak karena MODI,
- 11 permohonan ditolak karena keuangan, dan
- 15 permohonan ditolak karena alasan teknis IPPKH dan lain sebagainya.

Sebagai informasi bahwa total rencana produksi dari 51 perusahaan yang ditolak, ini sebesar 7,8 juta ton.

Selanjutnya *update* perubahan RKAB tahun 2023:

1. Permohonan yang masuk sebanyak 84 permohonan,
2. Telah disetujui sebanyak 38 permohonan,
3. Ditolak sebanyak 22 permohonan,
4. Permohonan yang dikembalikan sebanyak 12, dan
5. Sisa saldo permohonan sebanyak 12.

Alasan penolakan terhadap 22 permohonan perubahan RKAB tahun 2023, sebagai berikut:

- Ada 2 permohonan ditolak karena *Competent Person* Indonesia,
- 6 permohonan ditolak karena dokumen FS dan AMDAL,
- 2 permohonan ditolak karena keuangan, dan
- 2 permohonan ditolak karena, mohon maaf, 12 permohonan ditolak karena alasan teknis IPPKH dan lain sebagainya.

Pimpinan dan Anggota Komisi VII yang kami hormati.

Selanjutnya, kami akan memaparkan terkait mekanisme penyampaian RKAB 2024. Dasar hukum atau peraturan terkait RKAB sebagai berikut:

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021, yaitu Pasal 1 Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan yang selanjutnya disebut RKAB Tahunan adalah rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan dan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, yang meliputi aspek:

- Aspek pengusahaan,
- Aspek teknik, dan
- Aspek lingkungan.

Yang berikut, Pasal 177 Ayat (1) “pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun dan menyampaikan RKAB tahunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan”. Pasal 177 Ayat (1), “RKAB tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan Menteri”. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana penyusunan penyampaian dan persetujuan RKAB tahunan diatur dalam peraturan Menteri.

Yang berikut, Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2023 pada Pasal 2 yaitu “pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun dan menyampaikan RKAB tahunan kepada menteri untuk mendapatkan persetujuan.”

Yang berikutnya, Keputusan Menteri ESDM Nomor 373 Tahun 2023. Kemudian Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2023 merevisi Permen Nomor 7 Tahun 2020. Adapun pasal yang direvisi yaitu terkait RKAB umum pada Pasal 78, pada Permen 7/2020 diatur bahwa menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas RKAB tahunan, serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan. Sedangkan pada Permen 10/2023 telah diatur bahwa untuk RKAB tahap kegiatan eksplorasi berupa rencana kegiatan usaha pertambangan batubara selama 1 tahun atau untuk RKAB tahap kegiatan operasi produksi berupa rencana kegiatan usaha pertambangan batu bara tahunan selama 3 tahun.

Selanjutnya, revisi terkait tata cara penyampaian RKAB pada Pasal 79 pada Permen 7/2020 telah diatur bahwa wajib menyampaikan RKAB tahunan paling lambat 30 hari kalender sejak terbitnya IUP dan paling cepat 90 hari kalender dan paling lambat 45 hari kalender sebelum berakhirnya tahun takwim. Sedangkan pada Permen 10/2023, diatur bahwa RKAB tahap kegiatan eksplorasi dalam jangka waktu, yang pertama paling lambat 30 hari kalender sejak terbitnya IUP, kemudian paling cepat 90 hari kalender dari dan paling lambat 45 hari kalender sebelum berakhirnya tahun takwim.

RKAB tahap kegiatan eksplorasi produksi dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kalender sejak terbitnya IUP, kemudian paling cepat telah menyampaikan laporan triwulan II pada tahun berjalan dan paling lambat 45 hari kalender sebelum berakhirnya tahun takwim.

Revisi terkait tata cara evaluasi dan persetujuan RKAB pada Pasal 80 dan Pasal 81, di mana Pasal 80 pada Permen Nomor 7 Tahun 2020 diatur bahwa yang pertama, memberikan persetujuan atau tanggapan atas RKAB tahunan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kerja sejak diterimanya RKAB tahunan secara lengkap dan benar. Yang berikutnya, menyampaikan perbaikan atas RKAB tahunan dalam jangka waktu paling lambat lima hari kerja sejak diterimanya tanggapan atas RKAB tahunan.

Sedangkan pada Permen 10/2023, diatur juga bahwa memberikan persetujuan atau penolakan atas RKAB dalam waktu paling lama 30 hari sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar. Kemudian dapat mengajukan kembali permohonan RKAB paling banyak 1 kali.

Pada Pasal 81 Permen 7/2020, diatur bahwa pedoman pelaksanaan penyusunan, penyampaian, evaluasi dan persetujuan RKAB tahunan ditetapkan dalam keputusan menteri. Sedangkan pada Permen 10/2023 diatur bahwa pedoman pelaksanaan penyusunan, penyampaian, evaluasi dan/atau persetujuan RKAB tahap kegiatan eksplorasi dan RKAB tahap kegiatan operasi produksi, termasuk perubahannya ditetapkan dengan keputusan menteri.

Revisi terkait perubahan RKAB pada Pasal 89 pada Permen 7/2020 telah diatur bahwa dapat mengajukan satu kali perubahan RKAB tahunan pada tahun berjalan dan diajukan setelah menyampaikan laporan triwulan pertama dan paling lambat tanggal 31 Juli pada tahun berjalan. Sedangkan pada Permen 10/2023, diatur bahwa dapat mengajukan 1 kali perubahan RKAB pada setiap tahun berjalan dan diajukan setelah menyampaikan laporan triwulan pertama dan paling lambat tanggal 31 Juli pada tahun berjalan.

Mekanisme perubahan RKAB 2024 menyusun matrik RKAB IUP dan IUPK yang meliputi aspek, yaitu pertama, aspek perusahaan yang mencakup keuangan, produksi, perizinan, tenaga kerja, dan sebagainya. Kemudian aspek teknik yang mencakup penambangan, peralatan, peledakan, usaha jasa, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah aspek lingkungan yang mencakup pemantauan, bukaan lahan, reklamasi, pengelolaan lingkungan, dan sebagainya.

Konsep evaluasi RKAB 3 tahunan:

- Rencana tahun N-1,
- Kemudian realisasinya tahun N-1,
- rencana tahun N,
- Rencana tahun N+ 1, dan
- Rencana tahun N+2.

Selanjutnya penyusunan RKAB pemegang IUP dan IUPK, serta PKB2B dalam penyusunan RKAB tahunan wajib mengikuti format yang telah ditetapkan oleh direktorat jenderal atas nama menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. Format penyusunan RKAB diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 373 Tahun 2023. Selanjutnya penyampaian RKAB, untuk RKAB batubara tahun 2024, 2025, dan 2026 disampaikan melalui aplikasi [erkab.esdm.go.id](http://erkab.esdm.go.id) paling cepat 90 hari kalender dan paling lambat 45 hari kalender sebelum berakhirnya tahun takwim, yaitu antara 1 Oktober sampai dengan 15 November. Selanjutnya, paling lambat 30 hari kalender setelah terbitnya IUP.

Kemudian persetujuan RKAB. Yang pertama, dirjen atas nama menteri sesuai dan kewenangannya melalui evaluasi atas RKAB tahunan yang disampaikan. Kemudian direktorat Jenderal atas nama menteri sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas RKAB tahunan. Selanjutnya pemegang IUP dan IUPK dilarang berkegiatan sebelum mendapatkan persetujuan RKAB.

Ketentuan mengenai sanksi administrative, yang pertama, waktu sanksi peringatan tertulis: IUP yang tidak menyampaikan RKAB diberikan peringatan tertulis, diberikan paling banyak 3 kali dengan jangka waktu peringatan masing-masing selama 30 hari kalender. Berikutnya, penghentian sementara dan pencabutan izin, IUP yang mendapat sanksi peringatan tertulis setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis belum melaksanakan kewajibannya, akan dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara. Sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha dikenakan dalam waktu paling lama 60 hari kalender. Selanjutnya, sanksi administratif berupa pencabutan izin, dikenakan kepada pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajiban sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi berupa penghentian sementara.

Yang berikut akan kami tampilkan aplikasi e-RKAB yang dapat diakses melalui website [www.erkab.esdm.go.id](http://www.erkab.esdm.go.id). Berikut tampilan diagram **alur** proses bisnis e-RKAB yang dapat dilihat pada layar:

- Dimulai dari *input*,
- Submit data,
- Kemudian evaluasi 1,
- Perbaikan satu,
- Selanjutnya evaluasi 2,
- Perbaikan dua,
- Selanjutnya evaluasi 3,
- Evaluasi 4, yang masing-masing dilakukan hanya dalam waktu 2 hari kerja,
- Selanjutnya *review* atau *approval* oleh Eselon II, dan
- Persetujuan oleh dirjen.

Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI yang terhormat.

Demikian penjelasan kami pada rapat dengar pendapat yang diadakan pada hari ini, selanjutnya kami mohon arahan, petunjuk dan selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Pimpinan Rapat pada siang hari ini.

Terima kasih.

*Wabillahittaufig wal hidayah,  
Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM):**



*Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,*

Terima kasih atas pemaparan dan penjelasannya, luar biasa, terima kasih Pak Plt. Dirjen Minerba.

Tadi telah dipaparkan bagaimana kondisi RKAB dan juga bagaimana tahapan-tahapan untuk memperoleh RKAB, prosedur, dan sebagainya.

**F-GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):**

Interupsi Pak Ketua.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM):**

Iya.

**F-GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):**

Beliau dirjen baru ya?

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM):**

Plt. Pak.

**F-P. GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):**

Lebih cocok asli dirjen daripada Plt nih beliau, iya lebih cocok, saya lihat pas-pas penyampaiannya tadi, mantap.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM):**

Iya makanya, untuk itu Pak Ramson, makanya kita apresiasikan tadi.

**F-P. GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):**

Dirjen operasional langsung kan kekuasaannya banyak, kalau Inspektur Jenderal hanya meriksa-meriksa buku.

Terima kasih Pak Ketua.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM):**

Iya Pak Ramson luar biasa nih, pasti Pak Ramson baru dari dapil dengan berbagai persoalan dapil. Begitu ketemu Pak Dirjen ada perspektif lain, maka *appreciate* setinggi-tingginya. Baiklah, Bapak-Ibu sekalian.



Kami persilakan bagaimana kita mencermati ada sesuatu yang perlu dipertanyakan dan sebagainya, untuk itu dipersilakan dari Fraksi PDI Perjuangan, hadir di sini Pak Dr. Willy Midel.

Dipersilakan yang terhormat.

**F-PDIP (Dr. Ir. WILLY MIDEL YOSEPH, M.M.):**

Baik, terima kasih.

Pimpinan dan seluruh Anggota yang kami hormati,  
Kemudian Plt. Dirjen Minerba dan seluruh jajarannya.

Saya tadi menyimak apa yang telah dipaparkan oleh Plt. Dirjen luar biasa kalau saya melihat kalau ini bisa dilaksanakan, berarti ada banyak sekali terobosan-terobosan dalam rangka kita menghemat ya, menghemat waktu dan tentu juga yang ingin didapatkan oleh negara itu adalah berupa pajak atau restribusi yang menjadi hak negara yang selama ini, ya artinya dengan semakin cepatnya RKAB ini dan berlakunya tiga tahun, seperti yang direncanakan ini tentu juga akan banyak membawa dampak yang positif kalau saya melihat.

Saya sebenarnya, Pak Ketua ya, RKAB ini saya pikir cukup bagus sudah ya, saya masih belum bisa banyak bicara di sini, tetapi saya ini membawa aspirasi dari daerah ini ya, mungkin di dalam rapat kita itu acaranya itu lain-lain. Mungkin saya mau ambil yang lain-lain aja dulu karena yang lain-lain ini kan yang tentu tidak terprogram.

Lain-lain ini Pak Dirjen, yang ingin saya tanyakan itu adalah tentang ilegal ya, *illegal mining* yang ada di kampung saya, terutama di Murung Raya, yaitu PT AKT atau eks AKT yang sampai saat ini itu masih memproduksi ya dan tentu saya minta ketegasan ya, ketegasan dari negara ya melalui Pak Dirjen karena ini sudah berkali-kali kita membicarakan ini kayaknya negara ini kalah gitu ya, kalah. Maka oleh karena itu, saya merasa ikut bertanggung jawab selaku Anggota DPR di bidang pengawasan ya, saya mendorong agar masalah ini cepat diselesaikan. Kalau memang ada rencananya untuk segera lelang, kapan lelangnya gitu, supaya ini jangan berlarut-larut.

*Nah* saya sangat berharap sekali kepada Pak Dirjen karena ini pun sudah saya sampaikan berkali-kali langsung ke Pak Menteri. Tentu harapan kita semua ya agar ilegal yang cukup besar ya merugikan negara ini ya, cepat dituntaskan, mungkin salah satunya kami mendorong agar segera dilakukan lelang mungkin yang paling bagus ya karena kemarin sudah ada lelang tetapi gagal, lalu sampai saat ini kayaknya dibiarkan lagi gitu tidak ada progres untuk percepatannya.

*Nah* maka oleh karena itu, saya meminta kepada Pak Menteri untuk segera, kalau bisa jangan terlalu lama apakah bisa bulan November atau Desember itu tuntas, supaya tidak banyak pertanyaan ya kepada saya selaku orang yang berada dan punya tugas di Komisi VII dalam rangka pengawasan.

Jadi itu mungkin titipan saya Pak Dirjen, mungkin nanti lebih lanjut saya ingin juga langsung bertemu Pak Dirjen, mungkin kita bisa membahas ini secara, apa namanya, diskusi ya karena informasi dari kami cukup banyak karena kami sudah langsung juga datang melihat keadaan yang sebenarnya di lapangan. Mungkin seperti itu dulu Pak Dirjen, yang bisa kami sampaikan.

Terima kasih, kami kembalikan kepada pimpinan rapat.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM):**

Iya Pak Dirjen mungkin *asbabul nuzul*-nya ini memang peristiwa di Murung Raya ini kan sudah lama juga ya, bahwa disebut tadi oleh Pak Willy bahwa negara kalah. Jadi ada PT AKT kalau *nggak* salah ya AKT, jadi iya eks dan yang notabene telah dibatalkan maka harus dilelang. Waktu itu, BUMN yang salah satunya adalah ya Bukit Asam kan gitu, tetapi ternyata Bukit Asam sendiri setelah mengecek ke dalam, maka tidak berminat, kalau *nggak* salah begitu. Ada kewajiban lain adalah ditawarkan kepada BUMD kan begitu, ternyata BUMD-nya sendiri juga kok menyatakan tidak berminat dan seterusnya, seterusnya.

*Nah* tapi inilah Pak Plt. Dirjen, mungkin nanti menjadi bekal, bukan, menjadi bahan untuk terus ditelisik karena sudah menjadi keputusan nanti bagaimana dan sebagainya. Di Murung Raya ya, ini tambang batu bara ya dan seterusnya, seterusnya, kurang lebih itu.

Baiklah, dilanjutkan Fraksi Partai Golkar Pak Bambang Patijaya, jadi ada salam ya dari Bu lin, ini ada urusan lain.

**F-GOLKAR (BAMBANG PATIJAYA, S.E., M.M.):**

Baik, terima kasih Pimpinan.

*Assalamu'alaikum warahmatilahi wabarakatuh,*  
Selamat sore,  
Salam sejahtera untuk kita semua,

Yang saya hormati, Pimpinan Komisi VII, beserta rekan-rekan Komisi VII, Kemudian juga yang kami hormati Pak Dirjen Minerba beserta jajarannya.

Pak Dirjen, saya pikir apa yang menjadi pembahasan kita pada siang hari ini, sore hari ini, memang suatu pembahasan teknis yang sangat penting terkait dengan pelaksanaan aktivitas pertambangan di Indonesia. Salah satu



konsekuensi daripada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, di mana di awalnya, bahwa semua perizinan pertambangan, baik mineral dan logam dan non-logam itu ditarik ke pusat, sehingga semuanya menjadi sentralistik. Akibatnya di tahun 2020-2021 itu, totalnya 6.000-7.000 RKAB. Lalu kemudian di tahun 2021 ya atau 2022, itu ada perpres yang kemudian pendelegasian bahwa, mengenai perizinan untuk non-logam dikembalikan ke daerah, sehingga beban kerja menjadi berkurang. Tapi yang jelas ada satu masa transisi itu yang menyebabkan *load* kerja yang begitu banyak, sehingga menyebabkan permasalahan yang kemudian inilah yang menyandera situasi yang ada di Direktorat Pak Dirjen pada saat ini.

Saya melihat ini secara sekilas penyampaiannya bahwa memang *load* kerja jauh menurun ketika terjadi pendelegasian mineral non-logam ke daerah. Ini kalau dari paparan yang disampaikan oleh Pak Dirjen ini kan pada saat ini jumlah IUP yang terdaftar di MODI, kalau mineral logam 713 dan mineral non-logam atau batuan 39. Ini berarti yang ditangani oleh Direktorat Minerba seperti itu ya, dan tetapi kita juga melihat situasi yang ada bahwa kami prihatin walaupun proses penagakan hukum itu memang harus berjalan, tetapi kita juga harus memberikan satu kenyamanan di dalam berusaha.

Pada beberapa kesempatan yang lalu dan tadi juga sudah dibahas Pimpinan kita, Pak Bambang Haryadi sudah menyampaikan gagasan-gagasan bagaimana terobosan dan saya pikir ini perlu kami nyatakan bahwa Fraksi Golkar juga mendukung ya, tentang apa? Tentang bagaimana pendampingan kawan-kawan di Minerba ini di dalam proses mengeluarkan penerbitan IUP, dan sehingga dengan demikian dari pendampingan hukum ini, ini bisa memberikan satu pengarah-pengarah, masukan-masukan dalam proses mekanisme penerbitan IUP. Sehingga kita tidak menginginkan di masa yang akan datang itu terjadi, apa ya, kekeliruan-kekeliruan yang pernah terjadi sebelumnya itu.

*Nah* saya pikir ini satu terobosan. Tetapi saya juga sekali lagi mengatakan bahwa pendampingan ini sifatnya sementara, bukan sesuatu yang permanen karena yang diperlukan oleh kawan-kawan Minerba pada saat ini adalah satu kepastian, rasa kenyamanan di dalam melaksanakan tugasnya, dan saya pikir kita perlu memberikan suatu *troubleshooting* ya kan, di dalam jangka pendek ini, memberikan rasa tenang, kenyamanan, kemudian apa namanya, kepercayaan diri bagi kawan-kawan yang kemarin sempat goyah dikarenakan satu dan lain hal akibat proses penegakkan hukum.

Untuk itu, kami memberikan satu masukan, sependapat dengan penyampaian Pimpinan Pak Bambang Haryadi dan Pimpinan Komisi VII lainnya, tentang apa namanya ide pendampingan hukum tersebut. Kami usulkan dari kejaksaan seperti itu kan, sifatnya seperti apa silakan dibahas secara detail, MoU gitu, intinya Fraksi Golkar menyatakan dukungan.



Kemudian Pak Dirjen, saya masuk kepada hal yang kedua tentang mekanisme penyampaian RKAB untuk di tahun 2024. Ini sesuatu yang sudah sering saya tanya pada beberapa kesempatan sebelumnya, bahkan saya salah satu orang yang menyampaikan ide bahwa RKAB itu jangan setahun sekali karena waktu kita akan habis untuk hal-hal yang seperti ini. Tiba-tiba waktu sudah habis, ngurus lagi untuk RKAB tahun depan. RKAB 3 tahun ini saya pikir perlu disosialisasikan secara jelas kepada masyarakat, kepada para pelaku usaha, pelaku pertambangan, dan juga tentunya kepada *stakeholder* yang lain, sehingga ini menjadi informasi yang apa, yang jelas bagi semua semuanya. Kemudian, sehingga mekanismenya juga menjadi, menjadi transparan nanti, menjadi transparan, karena RKAB 3 tahun, per 3 tahun ini apa mekanismenya, saya melihat ini sudah ada apa penyampaian tentang penyusunannya seperti apa, penyampaiannya dan persetujuannya. Kami berharap bahwa ketika ada transisi ini, dari 1 tahun menjadi 3 tahun ini dapat tersosialisasikan dengan jelas dan kemudian ini menjadi acuan bagi kita semua di dalam melaksanakan aktivitas pertambangan 3 tahun ke depan.

Saya pikir demikian penyampaian dari saya, untuk beberapa hal mohon tanggapan dari Pak Dirjen. Untuk waktu dan kesempatannya, kami ucapkan terima kasih.

7 kali 7 sama dengan 49,  
Setuju enggak setuju yang penting sudah saya sampaikan.

*Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Selamat sore,  
Salam sejahtera semua.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM):**

Luar biasa nih 7 kali 7 memang 49 ya, setuju.

Baiklah, tadi saya kira hal-hal yang memang juga sama-sama kita bahas beberapa akhir-akhir ini menyangkut tentang proses supaya semua cepat, dan juga itu menyangkut tentang pendapatan negara dan sebagainya, dan kedua, tentang RKAB 3 tahun yang itu juga menjadi apa pemahaman kita semua, tapi perlu sosialisasi biar semuanya terang benderang. Kalau orang Jawa bilang "*cetho welo-welo*" kan begitu, itu penting.

Baiklah, selanjutnya adalah dari Gerindra, tadi mana Pak Ramson. Nah inilah Pak Ramson ini kadang-kadang sudah memuji terus hilang atau Pak Bambang langsung nih Pak Bambang.

Dipersilakan Pak Bambang.



**WAKIL KETUA KOMISI VII (BAMBANG HARYADI, S.E./F-GERINDRA):**

Baik, terima kasih Ketua.

Yang saya hormati Pak Dirjen dan juga seluruh jajaran,  
Saya hormati teman-teman Komisi VII.

Pak Dirjen ada sedikit interaktif, di halaman 4 kami melihat ini ada tulisan disetujui atau ditolak, kami tidak paham apakah 444 yang per 1 November 2023 dari jumlah IUP, dari jumlah permohonan 757, 444 itu disetujui atau ditolak? Dalam artian yang disetujuiin berapa, yang ditolak berapa? Kenapa tidak dipisah gitu loh. Sama seperti halnya yang di sebelumnya, proses persetujuan atau *pending* itu, yang mana disetujui yang mana di-*pending*? Itu kita biar tidak campur aduk Pak, gitu.

Mohon penjelasan singkatnya Pak.

**PLT. DIRJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDM RI (LETJEN. TNI (MAR) (PURN) BAMBANG SUSWANTONO, S.H., M.H., N.TR.(HAN), CGCAE):**

Boleh Pak, barangkali langsung direktur yang bersangkutan Pak.

**DIREKTUR DITJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDM RI:**

Mohon izin Pak Pimpinan.

Baik, data kami ini memang semula itu adalah usulan awal 757. Jadi di sini, 444 disetujui persetujuan lama, Pak. Kemudian ada *pending* awal tuh di data kami itu ada 113, jadi yang ditolak di sini 212, jadi total ada penambahan lagi dari, apa namanya, yang ditolak itu, kita evaluasi lagi per 6 November kembali itu 200 Pak, sebanyak 200 RKAB. Dari 200 RKAB itu, 189 kita evaluasi, kemudian 11 tidak hadir, lalu ada 175 IUP selesai evaluasi dan final dan 14 tidak hadir. Nah ini ada sampai saat ini, penambahan IUP yang disetujui dari 444 menjadi 457. Jadi 457 ini adalah awalnya 444 ditambahannya adalah 13 Pak. Jadi ada tambahan yang proses evaluasi itu baru 13 RKAB, nah sisanya itu masih proses Pak, proses persetujuan.

**WAKIL KETUA KOMISI VII (BAMBANG HARYADI, S.E./F-GERINDRA):**

Berapa persen itu Pak yang disetujuiin Pak, kira-kira dari total.

**DIREKTUR DITJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDM RI:**

Dari 457 per 757 itu sekitar 60%-an Pak, 60%-an.

**WAKIL KETUA KOMISI VII (BAMBANG HARYADI, S.E./F-GERINDRA):**

Baik, terima kasih Pak Direktur.

Jadi ada ini bulan sudah bulan 11, tinggal 1 bulan lagi. Masih ada 40% yang belum kan, tadi apa yang disampaikan sahabat saya Pak Patijaya kan, kami mendengar ini beberapa smelter sudah mematikan tungku-tunggunya, bahkan smelter-smelter besar di Sulawesi Tengah maupun di Sulawesi Tenggara. Kami mendengar langsung dari perusahaan tersebut, bahkan terjadi ya sedikit kegaduhan dan sedikit, mereka ini mulai meragukan investasi di Indonesia kan karena bagaimanapun, RKAB ini menjadi dasar ketersediaan bahan baku industri-industri nikel tersebut. Bahkan yang kami dengar info ini sudah tersampaikan kepada Bapak Presiden dan Bapak Presiden juga sudah menyampaikan terkait kegalauan para industri-industri ini.

Untuk itu, kami menyikapi itu dengan mengadakan RDP ini Pak. Salah satu hal yang kami sikapi adalah info yang kami dapat dari beberapa teman-teman di ESDM, ada semacam ketakutan dan juga ketidakpastian hukum yang membuat para evaluator ini bekerjanya ya agak ragu-ragu Pak, tadi Pak Dirjen juga menyampaikan. Nah untuk itu, kami butuh di dalam rapat ini untuk mendukung Kementerian ESDM, dalam hal ini memastikan bahwa koridor hukum yang dilaksanakan oleh para evaluator, dalam hal ini stafnya Pak Dirjen ini mendapat kepastian.

Dalam hal ini kami bukan ingin memayungi atau melindungi para pelanggar hukum, kami menghormati kan, kita harus hormati penegakkan hukum yang dilakukan itu kepolisian maupun kejaksaan. Namun, penegakan hukum tidak boleh mengganggu sistem, karena sistem ini lambat laun semakin terganggu, sangat terganggu besar Pak. Kan kami mendengar, hari ini diperiksa oleh Polres, besoknya diperiksa oleh Kejati, besoknya lagi diperiksa oleh Polda, ya kan. Nah hal itulah, nah ini Bu Lana ini, bahkan hampir setiap hari mereka hanya menghadapi proses hukum.

Nah, hal semacam inilah yang membuat kami harus membuat jembatan yang baik antara kementerian dan APH ini. Penengkakan hukum silakan berjalan, tidak boleh ada intervensi baik kekuasaan manapun untuk penegakan hukum. Namun, kita menggaris bawahi bahwa penegakan hukum jangan sampai mengganggu rutinitas, apalagi mengganggu investasi yang sifatnya butuh kepastian hukum. Kami beberapa kali berdiskusi dengan teman-teman Minerba, menanyakan kenapa, ini salah satu contoh mangkraknya RKAB sampai per hari ini kan, karena ada proses penegakan hukum di salah satu provinsi di Indonesia yang mengakibatkan hampir semua pihak di Kementerian ESDM diperiksa kan, entah itu jadi saksi kan. Nah ketersediaan SDM, sumber daya manusia di Kementerian ESDM pun itu terbatas kan. Kami sempat berdiskusi dengan Pak Menteri, Pak Dirjen waktu Raker sebelumnya, kami sampaikan tolong diberikan penegakan hukum

koridornya sampai mana, jangan sampai orang-orang yang tidak terlibat itu hanya untuk dimondar-mandir diperiksa Pak kan.

Nah untuk itu ini buat pembelajaran kita ke depan, ada memang kita tidak menutup mata, ada oknum-oknum yang bermain, namun tidak semuanya begitu kan. Untuk itu, kami berharap ke depan, ini sebuah pelajaran dan kita merujuk kepada ketentuan dalam perundang-undangan bahwa di Indonesia ini diperbolehkan Pak, karena jaksa itu salah satu pengacara negara. Diperbolehkan dilakukan MoU dengan kejaksaan maupun dengan kepolisian, bukan untuk melindungi, tapi untuk memastikan bahwa prosedur, kami tadi garis bawah ke Pak Dirjen ini pendampingan prosedur, bukan pendampingan terkait teknis. Bahwa prosedur sudah dijalankan dengan bagus dan sudah disupervisi oleh pengacara negara maupun penegak hukum di republik ini kan, yaitu kepolisian.

Jadi untuk memastikan bahwa kinerja yang, atau apa yang sudah dilakukan oleh staf Kementerian ESDM, dalam hal ini Dirjen Minerba sudah sesuai dengan kaidah hukum. Nah untuk itu moral staf-staf di Kementerian ESDM yang sekarang lagi ambrol, bahkan mengakibatkannya terbengkalainya RKAB ini dan ingatlah bahwa smelter-smelter itu sebagian besar PSN Pak, proyek strategis nasional, kan. Jangan sampai kita dikomplain oleh investor-investor dari negara lain akibat salah satu ini, yaitu proses penegakan hukum dan mereka semua pada takut, bahkan ada satu sampai bilang "Pak saya tidak pernah ikut, saya hanya bekerja sesuai, ini buktinya ini, tapi karena kami salah satu tim di situ ya tetap diperiksa." Ini sampai dia cerita, "Hari ini saya diperiksa ini pulang ke Jakarta, besoknya balik lagi periksa ini" kan.

Nah untuk itu untuk mengantisipasi celah-celah terjadinya pelanggaran hukum, kami mendorong kepada Kementerian ESDM untuk melakukan MoU dan di dalam hal ini, itu dibolehkan, bahkan di pemerintahan Presiden Jokowi sebelumnya ada loh Pak TP4P, tapi itu untuk pengadaan barang. Ini terhadap prosedur, prosedur saja itu dibolehkan Pak, apalagi untuk PSN tidak semuanya kan dan ini sifatnya hanya kepada prosedurnya ya. Jadi kejadian-kejadian seperti saat ini, seperti hal-hal yang terjadi kemarin tidak akan terulang lagi dan juga moralitas terhadap staf-staf Bapak juga akan bangkit kembali karena ada kepastian bahwa mereka bekerja sudah melalui pengawasan pengacara negara dan penegak hukum sesuai kaidah-kaidah yang ditentukan.

Jadi untuk itu saya mengusulkan, fraksi kami, Fraksi Partai Gerindra dan juga mudah-mudahan teman-teman ikut mendukung mengusulkan bahwa Kementerian ESDM harus melakukan MoU kan, MoU terhadap pendampingan prosedur. Jadi untuk ke depannya, kinerja ESDM tidak akan terganggu untuk memperlancar, dan ingat loh Pak, ada hal yang paling penting dalam terjadinya permasalahan tersendatnya RKAB yaitu pendapatan negara. Saya yakin pendapatan negara di sini dalam semester II 2023 ini

akan sangat turun, karena kita tahu pendapatan negara dari sektor ESDM ini sangat besar dari sektor pertambangan.

Nah untuk itu untuk memperlancar, bukan dalam, perlu digarisbawahi bukan dalam koridor untuk sebagai perlindungan, tapi ini upaya bahwa apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman ESDM sudah melalui proses pendampingan dan *monitoring* dari APH maupun pengacara negara. Untuk itu kami mengusulkan kementerian, dalam hal ini Pak Menteri, untuk melakukan dengan dua lembaga tersebut, Pak. *Entar* implementasinya bisa dilakukan per Eselon I, Pak Dirjen dengan Eselon I di masing-masing APH tersebut. Jadi staf-staf Bapak, baik Bu Lana, Pak Tri, Pak Yose, apalagi yang paling bawah Pak kan. Staf-staf evaluator, mereka merasa kinerja yang mereka yakini sudah benar akan terlegitimasi bahwa itu sudah sesuai kan. Kami soalnya kasihan juga kan, tapi kami juga tidak menutup mata, ada permainan oknum-oknum kan.

Nah dengan adanya ini oknum pun tidak akan bisa bekerja kan dan yang bekerja benar untuk bangsa dan negara akan merasa nyaman karena apa yang sudah dilakukan, sudah melalui prosedur yang benar. Jadi yang kami usulkan adalah pendampingan prosedur, jadi Pak Tri, Bu Lana, Pak Yose minimal sudah ada lah, apa, kepastian hukum dari APH ini, walaupun ada hal-hal yang kurang baik bisa dilakukan ini kan, dilakukan *legal opinion*, LO kan pada masing-masing pemegang kebijakan tersebut. Karena kami melihat, sampai saat ini banyak terbengkalai kan. Memang, kejadian ya kita sebut aja di Mandiodo itu cukup menampar kan, proses penerbitan RKAB dan juga sistem pertambangan kita. Namun jangan istilah di dalam pepatah itu jangan susu apa, nila setitik rusak susu sebelanga, Pak.

Untuk itu Pak Dirjen, kami dalam rapat ini dan kami ingin menyampaikan juga ke Pak Menteri, kami minta kepada teman-teman Kementerian ESDM, saya yakin Kementerian ESDM semua bekerja untuk bangsa dan negara, dan saya percaya bahwa tidak semua, mungkin ada oknum, tapi jauh lebih banyak di Kementerian ESDM itu sudah bekerja dengan benar. Tapi yang bekerja dengan benar ini jangan sampai mereka merasa terintervensi secara hukum, ketakutan, dan akhirnya melepas tanggung jawab, yang rugi semua. Saya mendengar bahwa ada beberapa staf yang minta mengundurkan diri, minta pindah kan, karena mereka capek juga kan, hari ini diperiksa, ini satu lagi diperiksa ini kan, jadi silih berganti.

Maka untuk itu, dalam raker ini mohon sekiranya usulan kami untuk dimasukkan di dalam kesimpulan rapat dan kami berharap bahwa ke depan, pelaksanaan persetujuan, baik persetujuan RKAB maupun MODI, bisa sudah sesuai, tidak ada lagi sengketa-sengketa pelaporan ini, pelaporan itu, dari lembaga ini minta di-*take down*, dari lembaga itu di-*take down* kan. Bahkan sampai tingkatan daerah kan, di bawah tingkatan gubernur, ada yang minta langsung minta data klarifikasi langsung, hanya hal penipuan apalah itu kan,

jadi ada kepastian hukum. Jadi memang semua sudah sesuai prosedur dan sesuai ketentuan hukum yang ada.

Mungkin itu saja dari fraksi kami menyampaikan, mudah-mudahan ini menjadi usulan dan dapat ditindaklanjuti, Ketua.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM):**

Luar biasa ya, Pak Bambang Haryadi, sekaligus dari Gerindra betapa empatinya coba itu Pak Plt Dirjen.

Kita ini tahu betul bagaimana bahwa Kementerian ESDM ingin bekerja yang terbaik, tetapi ada hal-hal yang mungkin karena oknum, karena ini, dan sebagainya, tetapi tadi dengan istilah yang agak ini, karena nila setitik maka rusak susu sebelanga. Jadi itu, dan itu nanti akan menjadi usulan diharapkan nanti ada semacam apa kerja sama antar instansi ya, di dalam bentuk pendampingan, nanti bentuknya apa nanti akan lintas ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Saya kira bagus sekali, jadi hari ini betul-betul Pak Bambang sebagai negarawan karena memang kita melihat memang sudah dekat-dekat gitu ya, begitu ya.

Baiklah dilanjutkan setelah Gerindra, sekarang Partai Nasdem ini ada Kakak Rico, dipersilakan yang terhormat.

**F-NASDEM (RICO SIA):**

Baik terima kasih Pimpinan, terima kasih juga kepada rekan-rekan semua.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Salam sejahtera untuk kita semua.

Terima kasih untuk paparan yang sudah diberikan, disampaikan oleh Pak Plh. Dirjen Minerba, oh Plt. Saya berharap, kalau boleh dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah menjadi definitif bukan lagi Plt. karena begitu mantapnya kalau kita lihat paparan tadi dan tentunya saya pikir sangat cocoklah dari mungkin TNI ya Pak ya, jadi juga menguasai banyak tidak hanya sebagai, mungkin teknis juga kan bisa dipelajari dalam waktu yang singkat.

Terkait dengan hukum, tentunya di lapangan pasti Bapak sudah lebih hebat lah punya jaringan yang begitu luas, jadi kalau terkait dengan agenda hari ini, saya pikir sudah terjawab dari paparan yang diberikan, masukan-masukan juga mungkin sama seperti apa yang disampaikan oleh Pak Bambang, Pak Pimpinan Pak Haryadi, juga kalau dari saya sendiri mungkin apa yang disampaikan oleh rekan dari PDIP. Di dapil kami juga di Masni ada pertambangan emas yang sampai sekarang sudah pernah apa namanya,



pernah diberantas, ada yang sudah ditangkap. Namun kemudian sekarang sudah mulai lagi beraktivitas lagi dengan peralatan alat-alat berat yang cukup banyak di sana di daerah Papua Barat. Mohon bantuan, atensi dari Pak Plt. Dirjen sehingga kekayaan negara ini, khususnya juga lingkungan yang berada di Papua yang menjadi sumber paru-paru apa namanya, oksigen dunia ini bisa terlindungi dan tentunya tidak apa namanya, manfaatnya dapat menambah PNBP. Bukan diambil oleh segelintir orang atau oknum-oknum yang mem-*backing* lalu kemudian kita enggak dapat apa-apa begitu.

Terima kasih Pimpinan, mungkin itu saja dari saya selanjutnya saya serahkan kepada Pimpinan ya Pak.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM):**

*Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.*

Pak Rico Sia, Beliau adalah dari daerah pemilihan Papua Barat yang sekarang dapilnya tambah karena ada pemekaran di sana, tentu nanti dengan berbagai dinamika yang ada, saya kira kita semuanya tahu Papua salah satu provinsi di mana sumber mineralnya cukup banyak, sehingga hal-hal yang sifatnya kepastian hukum menjadi penting, tadi ada satu contoh bahwa dulu dikatakan *illegal mining*, ternyata sekarang beroperasi kembali, bahkan dengan alat berat yang cukup masif. Nah yang begini-begini Pak Dirjen menjadi perhatian.

Baiklah dilanjutkan dengan PKB, ini Ibu Ratna Juwita, dipersilakan yang terhormat.

**F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.):**

Terima kasih Pimpinan.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Yang kami hormati Bapak Ketua, Pimpinan dan sahabat-sahabat Komisi VII,  
Yang kami banggakan Pak Dirjen beserta segenap jajarannya.

Yang pertama, tentu kami ingin memberikan apresiasi begitu ya kepada Ditjen Minerba karena dengan paparan yang disampaikan Pak, paling tidak kami bisa mengetahui inovasi dan terobosan-terobosan apa yang sudah dipersiapkan dari Dirjen Minerba untuk merespon atau juga sebagai bentuk mitigasi harapan kami dari banyak sekali persoalan yang timbul pada proses RKAB di tahun-tahun sebelumnya. Dan kami juga ingin sedikit melaporkan Pimpinan, bahwa per Oktober 2023 ini, PNBP kita khususnya dan dari sektor Minerba itu sudah bisa mencapai 99,9% karena sudah mengumpulkan sekitar



224 triliun dari target 225 triliun di tahun 2023. Sehingga ini juga sebagai bentuk komitmen yang sangat luar biasa dari Kementerian ESDM di tengah bagaimana terpuruknya kinerja dari Direktorat Jenderal Minerba dalam berbagai kasus kemarin, tapi ternyata tetap bisa memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap pendapatan nasional kita begitu.

Sehingga kami juga ingin mengingatkan, Pimpinan, bagaimana keberpihakan kita Komisi VII terhadap proyeksi-proyeksi anggaran dari Kementerian ESDM khususnya Dirjen Minerba ke depan. Ini juga perlu dipertimbangkan karena saya yakin dengan adanya keleluasaan anggaran yang dipergunakan, kita juga berharap Dirjen Minerba nanti bisa ada tambahan lembaga-lembaga khusus lah yang akan mengawasi dan memperkuat kinerja dari proses RKAB ini sehingga tidak lagi menimbulkan permasalahan seperti yang dihadapi kemarin.

Yang ingin kami sampaikan dan ingin kami pertanyakan Pak Dirjen, yang pertama adalah kalau tadi sudah ada banyak terobosan terkait proses RKAB, yang ini menurut saya luar biasa ya, di halaman 19 ini kan kalau misalnya *flow*-nya itu sesuai dengan prosedur gitu mungkin 4 hari sudah bisa selesai begitu ya. Bahkan itu targetnya ada yang, yang di atas kan 2 hari kalau tidak ada permasalahan. Jadi mungkin sampai dengan itu keluar gitu, bisa 4 hari begitu, ini sangat luar biasa. Cuman yang ingin saya ingatkan adalah mungkin perlu dipersiapkan juga Pak Dirjen, bagaimana sistem evaluasi untuk keandalan aspek lingkungan, keselamatan kerja, maupun kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitar pertambangan.

Kami berharap Dirjen Minerba juga memiliki satgas lah yang mengawasi sektor-sektor tersebut karena selama ini, yang kita ketahui kalau misalnya ada bukaan lahan, ada reklamasi, dan lain sebagainya saya bisa menjamin 70% itu tidak dilakukan dengan baik. Jadi perlu ada satuan khusus yang juga berperan terhadap permasalahan-permasalahan ini.

Berikutnya, saya juga ingin mengetahui, apakah selama ini ada satuan yang mencatat terkait aspirasi dari masyarakat, ataupun LSM, ataupun pihak-pihak terkait pada saat pelaksanaan proses RKAB di tahun 2023 ini, dan apakah hal-hal tersebut, kan termasuk partisipasi dari masyarakat ya yang harus direspon, apakah hal tersebut itu sudah dikumpulkan dan diintegrasikan dalam proses penyusunan RKAB nanti di tahun 2024. Kalau misalnya tetap setiap tahun, tapi kan tadi ada usulan beberapa fraksi ini dibuatnya per 3 tahun sekali begitu, saya ingin tahu.

Yang berikutnya, saya juga ingin mengingatkan Pak Dirjen kalau selama ini betul kita harus memperhatikan sektor usaha. Betul, negara ini membutuhkan banyak sekali investasi, tapi saya nitip, Pak Dirjen, melalui tangan-tangan regulasi yang kita punya begitu ya. Bagaimana sektor pertambangan ini juga turut berperan dalam proses pemberdayaan masyarakat yang ada di sekitar area tambang. Biasanya kan kalau industri,

Pak Dirjen, kita bisa gampang gitu ya menanyakan CSR-nya dan lain sebagainya, tapi sepertinya kalau udah urusan dengan perusahaan tambang ini kok kita agak takut-takut gimana gitu lho. Padahal masyarakat yang di sekitar area tersebut adalah masyarakat yang sangat terdampak dan perlu mendapatkan proteksi khusus gitu.

Yang terakhir, yang terakhir, kami juga berharap dari pelaksanaan RKAB 2023 yang tinggal sekian bulan ini bisa berjalan dengan baik, kami berharapnya begitu. Tapi kalau ini nanti ditemukan kendala-kendala, semoga hal tersebut bisa segera dimasukkan dalam evaluasi, sehingga pelaksanaan proses RKAB di tahun 2024 itu tidak lagi menjadi kendala.

Mungkin itu Pimpinan yang bisa kami sampaikan, terima kasih atas waktunya, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami Komisi VII semuanya ini selalu mendoakan semoga mitra-mitra kami ini bisa bertugas dengan baik, dengan nyaman, dengan sepenuh hati demi memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia.

Terima kasih, kami akhiri.

*Wallahul muafiq ila aqwamitthoriq,  
Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM):**

*Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.*

Ibu Ratna Juwita dari Fraksi PKB, menggarisbawahi kalau dirangkum adalah itulah bagaimana ESG harus dijalankan dalam apa hukum-hukum korporasi pertambangan, *environment social responsibility* dan *governance*.

Saya kira ini menjadi kunci, menekankan berbagai aspek tentang lingkungan tadi, termasuk tentang reklamasi, di Undang-undang Minerba saya kira tegas ya reklamasi, pemulihan reklamasi itu sampai tercantum 100%, saya ingat sekali kalimat ini karena memang penting. Sehingga kita bersyukur Undang-Undang Minerba salah satu tidak dikritik itu karena memang menjamin ada namanya reklamasi sampai tingkat 100%. Bahkan juga ada di situ saya kira kita kenal Jamrek ya, jaminan reklamasi dan sebagainya. Tetapi apapun yang ideal dalam undang-undang, *das sollen*, *das sein*-nya, tetapi kadang-kadang di lapangannya tidak juga dilaksanakan dengan baik.

*Nah* di sinilah fungsi pengawasan, tadi Mbak Ratna juga kebetulan tahu persis PNBPN yang sudah masuk hari ini sudah 90% lebih ya, 99,9 bahkan. Artinya ini sebuah prestasi kementerian, maka ya ada namanya *reward and punishment* dalam hal manajemen. Mestinya betul memang ketika kita mengajukan anggaran di APBN 2024, beberapa mata anggaran yang kita anggap penting waktu itu tidak disetujui Pak Dirjen, misalnya perihal tentang

CISEM tahap selanjutnya, betul dan juga bagaimana membangun infrastruktur energi khususnya SUTET, saluran utama tegangan tinggi di tingkat Sumatra karena kita tahu ke depan tuh banyak sekali PLTA dan PLT panas bumi di Sumatra yang akan harus *upstream*, nah maka perlu itu, tetapi tidak disetujui. Mudah-mudahan, karena kita tahu saya kita semuanya diskusi dengan Dirjen Anggaran dan juga dengan komisi apa anggaran itu, Banggar, kebetulan Mbak Ratna ini Anggota Banggar. Masih ada namanya dana cadangan 51,4 triliun, betul Mbak ya? Yang mudah-mudahan kita bisa perjuangkan.

*Nah* inilah bagaimana bentuk kepedulian kita dan diakhiri dengan semoga menjalankan tugas dengan aman dan nyaman kan gitu. Sejuk betul memang PKB, partai hijau, betul? Kenapa demikian dan sekarang kita semuanya amini semuanya itu, amin.

Baiklah dilanjutkan, selanjutnya Pak Sartono dari Partai Demokrat.

**F-PD (SARTONO, S.E., M.M.):**

Terima kasih, kalau saya gimana Pak Sartono? *Qabul*.

Terima kasih Pimpinan, Pak Sugeng yang mencairkan suasana. Baik, terima kasih. Amin, semakin keras saya.

Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Dirjen, dan seluruh jajarannya.

Tadi sudah mendengarkan paparan secara menyeluruh dari Pak Dirjen dan juga dari masukan-masukan, dan juga usulan-usulan dari para sahabat tadi. Saya tertarik apa yang disampaikan Pak Bambang. Dua-duanya ada Bambang ini, ada tiga di sini Pak Bambang, Pak Dirjen Pak Bambang, Pak Bambang Pimpinan, dan Pak Bambang dari Gerindra maupun dari Golkar. Bersepakat untuk memberikan penguatan ya, memberikan payung hukum dan juga ada nota kesepahaman lah kurang lebih begitu dengan aparat penegak hukum, yang mana juga bagian daripada pemerintahan ini begitu.

Ini berdasarkan fakta-fakta lapangan, bahwa selama ini katanya para staf yang mempunyai tanggung jawab di bidang minerba ini di, begitu hari-harinya habis untuk diperiksa begitu, urusan-urusan dari apa pertambangan ini. Yang kita khawatirkan Pak Ketua, Pak Dirjen, nanti para ASN ini ya yang pemangku kepentingan *mengurusin* minerba ini, "ah sudahlah kepolisian atau kejaksaan aja lah yang *ngurusin* ini," begitu Pak ya karena sudah saking pusingnya begitu.

*Nah* dalam forum yang terhormat ini, kami bersepakat untuk ada suatu MoU ataupun kesepahaman, tentu di situ ada bidang-bidangnya ya, mungkin di dalam penegakan hukum, di dalam tata beracara tentang apa regulasi aturan, supaya ini berjalan lancar, cepat tadi, nyaman, aman, dan selamat. Ini

kadang-kadang aman itu sementara itu Pak Ketua, harus ada selamatnya itu. Selamat itu berarti urusannya betul-betul apa, tidak wasangka atau tidak khawatir itu teman-teman, dan saya ikut merasakan karena kita sebagai mitra begitu ya. *Nah* ini kalau terjadi, saya pikir juga sudah beberapa kali mengadakan MoU ya Kementerian ESDM dengan Kepolisian, mungkin dengan Kejaksaan Agung begitu, dan ini juga memberikan dampak tentu positif terhadap ya apa peningkatan pendapatan negara ya, PNPB begitu. Tadi Ibu Ratna menyampaikan sudah 99 ke depannya bisa 190% itu ada peningkatan dari sektor PNPB ini, jadi tidak *diribetkan*, tidak dicepekkkan oleh urusan-urusan ini begitu, energinya habis di situ. Tidak ada kepastian juga dari pihak investornya dan sebagainya, bukan ini terjadi KKN atau apa kolusi tetapi supaya ada kepastian, apa sih yang menjadi permasalahan hukum ini, tetapi kalau ada MoU di situ bisa, apa yang sampaikan Pak Sugeng tentang lebih terang benderang, *cetho welo-welo*, itu jalannya bisa lancar.

Kurang lebih begitu Pimpinan untuk yang pertama. Yang kedua, tentu apa yang disampaikan Pak Dirjen tentang apa pengurusan daripada RKAB ya biasanya 1 tahun, sekarang lamanya 3 tahun ya, sehingga ini akan memberikan juga suatu kepastian terhadap perencana produksi perusahaan untuk jangka 3 tahun ke depan. Namun juga, kami mengimbau pemerintah juga dari hal ini ESDM, terus juga apa melakukan pengawasan ya, ekstra ya jangan sampai ada apa itu permasalahan-permasalahan *human* atau *data error* di dalam proses regulasinya dan ini suatu langkah yang baik begitu untuk ke depannya.

Demikian Pimpinan, terima kasih.

*Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-P. NASDEM):**

*Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.*

Pak Sartono, beliau dari Fraksi Partai Demokrat daerah pemilihan Pacitan, betul ya ini agak wilayah timur Pak Bambang.

**F-PD (SARTONO, S.E., M.M.):**

*Pawitan Golek*, Pacitan-Ngawi-Magetan-Ponorogo-Trenggalek. Jadi bukan *Golek Pawitan* gitu Pak Ketua.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-P. NASDEM):**

Iya, demikian tadi dari Pak Sartono. Dilanjutkan yang lain dari PAN, Pak Nasril. Nah Beliau ini daerah pemilihan Sumatera Utara.

Dipersilakan yang terhormat.



**F-PAN (H. NASRIL BAHAR, SE):**

Terima kasih Pimpinan.

Pimpinan dan Anggota Komisi VII yang kami hormati,

Pak Dirjen dan segenap jajaran dari Kementerian ESDM, Ibu Lana, Pak yose, dan kawan-kawan.

Sebelum mengajukan beberapa hal saya mau konfirmasi, tahun kalender yang dimaksudkan terhadap sebuah perizinan ataupun RKAB itu dari Januari sampai Desember ya, Pak? Iya, Pak, ya? Artinya Pak Dirjen, ya, kita ingin tahu pem-*break down*-an terhadap *update* persetujuan RKAB tahun 2023, permohonan 948 disetujui 890, ditolak 51 dikembalikan *zero* saldo 7. Kita ingin tahu *update*-nya, Pak, Januari berapa keluar, Februari berapa keluar, sampai terakhir di November berapa keluaranya? Kalau kita akumulasikan 890 iya kan begitu, tetapi yang keluar dari bulan per bulan itu berapa? Nah ini mohon ditayangkan, ya, karena apa? Terlalu cepat kita memberikan apresiasi terhadap kinerja percepatan RKAB. Kami ingin tahu bulan per bulannya berapa? Kenapa berlakunya Januari sampai Desember? Kalau yang keluaranya di bulan Oktober tentu masa kerjanya sampai Desember betul ya, Pak? Tentu mereka melakukan pengajuan perubahan dan sebagainya.

Nah ini yang kami ingin tahu, bisa *nggak* ditampilkan dari Dirjen Minerba, juga mineral dan juga batubara, Pak. Saya ada mungkin, Pak, ketika kita Pak Dirjen ke Sultra kemarin mereka segan saja, mungkin enggak, mungkin *ewuh pekewuh* saja mengatakan bahwa kenapa ya produksi NPI-nya turun? Mungkin salah satunya RKAB-nya yang lambat keluar karena berapa pun NPI dari Indonesia, itu saya pikir ditampung oleh China. Nah ini yang kami ingin tahu ya terhadap bulan per bulannya produk dari RKAB dari Kementerian ESDM. Kalau di akhir tahun ini, ini kan sudah November, dari 98 keluar disetujui 890, kita *nggak* tahu berapa yang keluar di bulan Januari, Februari, Maret sampai pertengahan, satu, Pak.

Yang kedua, ini kan ada dua ya, Pak. Permen 7/2020 terjadi perubahan Permen 10/2023. Yang signifikan perubahannya ini yang mana, Pak? Saya baca-baca bolak-balik, bolak-balik juga tidak ada yang signifikan. Nah yang kedua, apakah payung hukum 10/2023 ini terhadap pemberlakuan 3 tahun ini sudah masuk belum, Pak? Sudah? Pak Dirjen? Mohon interaktif Pak Pimpinan.

Pemberlakuan, ya, RKAB 3 tahun ke depan itu di Permen 10/2023 sudah keluar? Di Pasal berapa, ya, Pak? Tahap kegiatan operasi produksi berupa rencana kegiatan usaha pertambangan batubara tahunan selama 3 tahun. Berarti semenjak diterbitkannya di September ini, September kemarin ya, 11 September itu sudah, berarti yang terbit Oktober itu sudah 3 tahun? Belum, oh 2022 itu, oh itu 2023.

Artinya ini kan masih ada, ya, keluar lagi, ya, Pak, RKAB-RKAB di bulan November? Nah kalau memang pengajuan perubahan itu sudah *automatically* 3 tahun ke depan? Tidak? Misalnya volume waktu, belum? Ini kan juga kita harus *clear*, Pak, jangan jangan Anggota DPR ini tempat bertanya dari para pelaku-pelaku, ya, pengusaha sehingga seakan-akan nanti di sini pula jadi kantor Kementerian ESDM kan gitu.

Nah yang perlu juga kami ingin tahu, ya, di samping, ya, memang yang signifikan itu di Pasal 78 aja, ya, Pak, ya? Pasal 78 saja perubahan ini yang signifikan yaitu masa ya pemberlakuan RKAB. Di sini evaluasi tahunannya itu, Pak, kan tentu banyak yang kita evaluasi, ya, dari reklamasi, ya kan, sebelum itu bagaimana mekanismenya nanti itu. Ini kan dari misalnya 2024 keluar, ketika masuk ke 2025 itu kan tidak otomatis mereka bisa melakukan eksploitasi pertambangan. Tentu ada ada persetujuan ulang saja kan, ya, terhadap ceklis-ceklis, ceklis misalnya reklamasi sudah tuh pembayaran royalti dan sebagainya. Nah itu di aturan mana itu masuknya itu? Di Permen 10 atau ada turunannya lagi? Kan *nggak* ada.

**KEMENTERIAN ESDM RI:**

Izin, Pak, di Kepmen 373 Pak.

**F-PAN (H. NASRIL BAHAR, SE):**

Oh Kepmen 373.

**KEMENTERIAN ESDM RI:**

Jadi sudah otomatis 3 tahun, tiap tahunnya tidak ada persetujuan lagi, Pak.

**F-PAN (H. NASRIL BAHAR, SE):**

Oh *nggak*, persetujuan tetap tapi ceklis, apa sudah *nggak* perlu ceklis itu, misalnya boleh lanjut langsung?

**KEMENTERIAN ESDM RI:**

Iya.

**F-PAN (H. NASRIL BAHAR, SE):**

Langsam ini?

**KEMENTERIAN ESDM RI:**

Iya.

**F-PAN (H. NASRIL BAHAR, SE):**

Kalau pemberlakuannya Langsam, ya, saya mempunyai catatan, ya, tolong dipertimbangkan kembali kalau Langsam. Mesti ada kontrolnya, Pak, paling tidak ini laporan, laporan kepada kementerian, ya, terhadap 1 tahun ini apa saja yang dikerjakan dan apa saja kewajiban yang telah dilaksanakannya baru sudah lanjut dan itu harus cepat karena kalau Langsam 3 tahun siapa yang tahu apa yang terjadi di sebuah pertambangan. Itu usulan, ya, boleh dipertimbangkan di dalam rapat-rapat kementerian nantinya, kalau Langsam 3 tahun itu akan membahayakan negara tapi dalam akhir tahun mereka memberikan *report* kepada kementerian ya sehingga ini loh, jadi pertahun itu ada pertanggungjawabannya. Meskipun mereka langsung bekerja tapi ada pertanggungjawaban tahunannya. Nah sehingga ya tidak melakukan selama 3 tahun pembiaran terjadi kesalahan yang terus-menerus tanpa kontrol di lapangan. Ini kan kita bicara tentang regulasi, tentang aturan yang kita sepakati ya, baik pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat.

Saya pikir itu saja catatan-catatan yang perlu kami sampaikan, ya, sehingga, ya, ucapan terima kasih kita terhadap perubahan Permen 7 Tahun 2020 menjadi Permen 10/2023 terhadap pemberlakuan RKAB selama 3 tahun ke depan, catatan kami dari Fraksi Partai Amanat Nasional itu, Pak. Demi keselamatan negara, ya, mesti ada kontrol tahunannya, tanpa ada kontrol tahunan kita tidak tahu apa yang terjadi di lapangan selama 3 tahun.

Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM):**

Iya luar biasa dari Pak Nasril dari Partai Amanat Nasional, beliau minta detail. Catatan-catatan detail jadi tidak sekedar *bam* begitu saja sampai tadi perkembangan per bulan harus menjadi catatan dan terakhir adalah bagaimana mekanisme kontrol atau mekanisme evaluasi. Meskipun RKAB itu adalah berlaku 3 tahun tetapi bagaimana setiap tahunnya tetap diadakan evaluasi. Saya kira ini betul dan berbagai hal yang tadi disampaikan.

Baiklah, adakah masih yang belum? Kalau semuanya sudah, saya kira dipersilakan Pak Plt. Dirjen untuk menyampaikan atau Pak Bambang ada catatan? Cukup.

Dipersilakan yang terhormat Pak Dirjen.

**PLT. DIRJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDM RI (LETJEN. TNI (MAR) (PURN) BAMBANG SUSWANTONO, S.H., M.H., N.TR.(HAN), CGCAE):**

Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat.

Yang pertama dari Bapak Willy Midel PDIP di mana mengenai



*illegal mining* PT AKT di Kalimantan Tengah, ini memang saat ini sedang marak. Untuk perhatian dari Bapak akan segera kita tindak lanjuti, Pak. **Yang pertama** kami sendirikan sebagai irjen, Pak, kami sebagai Irjen juga sebagai pengawas organisasi. Jadi kami juga mengawasi di unit-unit kami secara internal, Pak. Cuma kekurangan kami ini kan kami tidak punya apa, Pak, perangkat untuk bisa memobilisasi masalah adanya tindak apa *illegal mining* di luar itu, Pak.

Namun demikian beberapa minggu yang lalu ya 3 minggu yang lalu, saya sudah rapat dengan Menkopolkam ya di mana sedang dirancang untuk keppres penegakan hukum di sektor ESDM, di mana di dalam penegakan hukum ada 3 satuan tugas. Yang pertama, masalah penegakan *illegal mining*, di mana Dirjen Minerba sebagai *leading* sektornya; kemudian penegakan *illegal drilling*, di mana Dirjen Migas sebagai *leading* sektornya; kemudian mengenai penyalahgunaan BBM bersubsidi, di mana Kepala BPH Migas sebagai *leading* sektornya, dan yang empat menangani pencurian listrik, di mana Dirjen Gatrik sebagai *leading* sektornya.

Jadi ada 4 Satgas yang akan menindaklanjuti tentang adanya pelanggaran tentang beberapa tindak kejahatan, terutama di sektor ESDM. Namun demikian terima kasih atas sarannya kepada Pak Willy, ya, dan akan segera kita tindak lanjuti, Pak, masalah *illegal mining* di PT AKT.

#### **F-PDIP (Dr. Ir. WILLY MIDEL YOSEPH, M.M.):**

Izin, izin Pak Ketua.

Begitu Pak Plt. Dirjen yang kami maksud jangan terlalu lama, Pak. Pertama itu karena ini kan sudah pernah dilelang, Pak, lalu lelang berikutnya itu kapan gitu? Di mana? Nah ini yang kami ini karena kalau masalah ilegalnya itu Pak Dirjen yang lama pun sudah datang ke sana, sudah bersurat, kami melihatnya bahasanya tidak mempan, Pak. Jadi ini betul-betul negara ini kalah, Pak.

Nah maka oleh karena itu saya melihat solusi yang paling bagus itu karena sudah ada upaya untuk melelangkan ini AKT, ya, areal ini, ini kan sudah sudah tidak ada bertuan, Pak. Nah sudah tidak bertuan karena sudah dicabut, sudah final gitu ya, nah mungkin ini tugas Pak Dirjen yang menurut saya menjadi atensi yang sangat tinggi, yang sangat penting karena saya sudah lama, Pak, ngejar-ngejar ini kok *nggak* ada anunya gitu, *nggak* ada hasilnya gitu loh, dan saya selalu pulang ke kampung, selalu dipertanyakan tentang ini gitu.

Nah maka oleh karena itu ya mungkin ada saatnya nanti saya ingin bertemu Pak Dirjen, kita mau berbicara khusus tentang ini apa yang harus dilakukan karena saya berupaya secara adat saya sudah melakukan upaya supaya di daerah sana itu tidak banyak kejadian-kejadian yang bisa viral gitu, Pak. Jadi mungkin menurut saya karena beberapa waktu yang lalu saya langsung bertemu Pak Menteri, Pak Menteri memberikan

jawaban kepada saya bahwa ini akan segera dilakukan pelelangan ya. Nah tetapi ini sudah berbulan-bulan juga gitu, nah jadi berbulan-bulan juga maka oleh karena itu saya berharap sekali dengan Pak Dirjen yang baru ini mampu mengatasi hal ini secepatnya, Pak, secepatnya ada *action*-nya supaya ini karena ini menurut saya yang paling terbesar di Indonesia ini, Pak, kasus ini yang terbesar loh, Pak, ya karena bagi saya berapa banyak kerugian negara gitu.

Nah maka oleh karena itu saya merasa ikut bertanggung jawab selaku orang yang punya daerah di sana, kemudian sebagai Komisi VII pula saya dan ada dua orang lagi teman saya di sini, Pak, tadi kami ada bertiga orang dari Kalimantan Tengah. Maka oleh karena itu ini menjadi perhatian yang saya titipkan ke Pak Dirjen ya karena ini tentu saya akan kejar lagi, Pak.

Terima kasih, Pak.

**PLT. DIRJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDM (LETJEN. TNI (MAR)  
(PUKN) BAMBANG SUSWANTONO, S.H., M.H., N.TR.(HAN), CGCAE):**

Terima kasih Pak Willy.

Jika diizinkan mungkin dari sisi lain di staf kami Direktur Batubara akan menyampaikan tentang apa yang terjadi di PT AKT, Pak, untuk melengkapi.

Silakan.

**DIREKTUR BATUBARA KEMENTERIAN ESDM RI:**

Izin, izin Pak Ketua, izin Pak Plt.

Jadi Pak Willy terkait dengan AKT, kami memang belum bisa melakukan penawaran WIUPK kembali karena memang masih ada tuntutan hukum yang belum inkrah, Pak, yaitu digugatnya pemerintah terhadap penetapan wilayah izin pertambangan khusus PT AKT ini. Di mana PT AKT ini mengajukan arbitrase ke BANI terkait pengakhiran PKP2B dan pihaknya menang. Sedangkan KESDM mengajukan pembatalan putusan BANI di Pengadilan Jakarta Pusat dan saat ini sedang proses kasasi.

Demikian, barangkali yang bisa kami informasikan.

**F-PDIP (Dr. Ir. WILLY MIDEL YOSEPH, M.M.):**

Sedikit, menurut saya kalau memang ini masih istilahnya tidak jelas keberadaan hukumnya karena yang pernah kita tahu apa yang sudah dilakukan oleh negara ini kan sudah inkrah. Menurut saya jalan tengahnya *stop* dulu kegiatan gitu, jadi ini yang paling paling pas menurut saya. Jadi kalau ini lanjut terus, ini kan upaya-upaya men-*delay*-kannya gitu loh, Bu.

Ya jadi menurut saya pemerintah atau negara harus berani untuk melakukan ini, ini yang saya ingin harapkan penyelesaiannya.

Terima kasih, Pak.

**PLT. DIRJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDM (LETJEN. TNI (MAR) (PURN) BAMBANG SUSWANTONO, S.H., M.H., N.TR.(HAN), CGCAE):**

Terima kasih, Pak.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM):**

Saya kira kalau memang ini persoalan lama sebetulnya pernah dibahas secara intens juga di sini Pak Plt, tentang tetapi memang nanti kalau gitu mungkin karena di daerah pemilihannya beliau nih ceritanya, mungkin nanti ada apa lah langkah-langkah yang kita secara bersama-sama nanti kita cermati bersama, tapi bahwa prosesnya masih berlangsung secara hukum ya, mereka menuntut secara BANI dan memenangkan. Sementara sekarang ESDM mengajukan banding terhadap itu ya, ini berarti memang ternyata prosesnya belum inkrah tanda kutip karena masih saling tuntutan-menuntut.

Tapi betul juga kalau memang *uncertainty* secara hukum, tetapi ternyata ini produksi jalan terus kan gitu Pak Willy. Nah ini mungkin nanti coba kita cari jalan terbaik yang apa ya sebetulnya ini semuanya begitu, Pak ya.

**PLT. DIRJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDM (LETJEN. TNI (MAR) (PURN) BAMBANG SUSWANTONO, S.H., M.H., N.TR.(HAN), CGCAE):**

Terima kasih, Pak.

Khusus untuk PT AKT yang di Kalteng ini sudah dilaporkan, Pak, dari pihak kami ke Polda, Pak, namun sampai saat sekarang iya ke Bareskrim Pak, lantas sampai sekarang tidak diatasi, Pak.

**F-PDIP (Dr. Ir. WILLY MIDEL YOSEPH, M.M.):**

Pak, makanya inilah saya katakan negara ini kalah, Pak, ya. Maka oleh karena itu saya titipkan ke Bapak ya agar ini segera diselesaikan, paling tidak aktivitas ilegal ini *stop* dulu gitu. Ini yang kita harapkan, jadi kalau ini tetap berlangsung, oke lah kalau memang ada satu upaya-upaya hukum tetapi ini kan kita sudah tahu, negara ini kan sudah inkrah kok. Lalu apalagi yang dilakukan, menurut saya itu ada satu terobosan, keberanian dari negara atau aparat jadi jangan ada pembiaran yang terus-menerus seperti ini.

Nah maka oleh karena itu sekali lagi kami berharap ya kepada Pak Dirjen untuk segera membahas ini ya, untuk segera ini bisa teratasi, kira-kira itu dari saya.

Terima kasih, Pak.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM):**

Iya, saya kira ini menjadi bukan PR ya tetapi nanti akan kita secara khusus bahas ini tindak lanjut secara khusus.

Tadi diserahkan ke Pak ini ya ke Pak Dirjen, kenapa *nggak* diserahkan ke misalnya saya gitu, artinya kan ada ke depan ini loh gitu, ya sekedar apa tinggal mengamini saja.

Dilanjutkan Pak Dirjen untuk menjelaskan yang lain.

**PLT. DIRJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDM (LETJEN. TNI (MAR) (PUARN) BAMBANG SUSWANTONO, S.H., M.H., N.TR.(HAN), CGCAE):**

Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat.

Yang berikut dari Pak Bambang Patijaya, ini terkait masalah pendampingan untuk Minerba dan jika diizinkan sekaligus saya menjawab dengan Pak Bambang Haryadi karena hampir sama ini Pak, pendapat dari Pak Bambang dengan dua-duanya Pak Bambang, mohon maaf, Pak. Pak Bambang Patijaya dan Pak Bambang Haryadi, intinya saran dari beliau-beliau semua itu bagi kami, Pak, saya berterima kasih, Pak. Ini atensi dari Bapak-bapak di DPR untuk bagaimana supaya teman-teman kami yang ada di Minerba ini Pak bekerja dengan tenang, Pak. Kami butuh ada kepanjangan tangan dari pihak aparat tenaga hukum, dalam hal ini Kepolisian, dalam hal ini Kejaksaan untuk pendampingan. Pendampingan dalam arti bukan hal yang masalah teknis, Pak, ya, pendampaian dalam kegiatan penyusunan RKAB, termasuk prosedur-prosedur, siap.

Saya akan laporkan kepada Bapak Menteri, Pak, tapi ini memang suatu terobosan yang luar biasa dan ini yang membuat kami agak sedikit tenang, Pak, di lapangan, termasuk yang di staf-staf manakala kami hari-hari biasanya dipanggil Kepolisian, dipanggil apa Kejaksaan iya kan. Ada suatu pengalaman dari kami, Pak, beberapa waktu yang lalu, itu teman-teman kita dari Kejaksaan kalau saya lihat yang manggil selevel eselon 4 ya memanggil atas nama sudah *by name* staf-staf kami untuk menyerahkan data dokumen tentang ini, ini, ini, PT ini, PT ini, PT ini. Padahal PT-PT ini kan masih belum bermasalah, Pak, di depan kami, sehingga kami keberatan. Kenapa sudah manggilnya *by name* gitu ya, tidak kepada saya sebagai Dirjen Minerba. Akhirnya saya tolak, Pak, suruh mereka bikin suratnya kepada saya ya, tidak ada orang perorang dipanggil menghadap aparat penegak hukum hanya untuk menyerahkan data-data saja, tidak ada. Waktu kita habis terbuang di sana ya, termasuk data-data yang lain, Pak.

Kemudian terkait dengan masalah RKAB, Pak, 2024 ya, yang RKAB 3 tahun, ini kami sudah melaksanakan sosialisasi ya, dengan melalui bimbingan teknis minggu kemarin ya, 1 November minggu yang lalu ya, di Hotel Episode di Tangerang Selatan untuk melaksanakan bimbingan teknis kepada pelaku usaha, baik bidang mineral dan batubara terkait dengan masalah penyusunan RKAB 2024, 900 ya, kira-kira 900 perusahaan, Pak, yang sudah hadir, Pak, baik secara *online* dan *offline*, Pak, sudah kami sosialisasikan. Namun demikian kalau memang dirasa kurang kami akan ulangi lagi, tidak ada masalah, Pak. Itu dari Bapak Bambang.

Kemudian dari Bapak Rico, kami terima kasih, Pak, ini kalau tidak salah yang lalu juga Pak Rico menyuarakan masalah adanya *illegal mining* di Papua Barat, Pak. Kalau boleh kami catat, Pak, untuk tempatnya, kemudian PT-nya, Pak, kalau memang boleh ada.

**F-NASDEM (RICO SIA):**

Izin interaktif Pimpinan.

Kita *nggak* punya PT karena itu mereka masif aja begitu aja, jadi memang benar-benar ilegal. Iya jadi dia pakai tamengnya rakyat untuk seolah-olah nanti kalau ada apa-apa rakyat yang rebut, ini buat cari makan gitu.

**PLT. DIRJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDM (LETJEN. TNI (MAR) (PURN) BAMBANG SUSWANTONO, S.H., M.H., N.TR.(HAN), CGCAE):**

Tempatnya, Pak?

**F-P. NASDEM (RICO SIA):**

Tempatnya di Masni itu Manokwari, Manokwari apa Manokari Selatan, terus Kebar, terus mungkin di sekitaran Tambrau.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM):**

Pak Rico nanti mungkin memberi data yang lebih akurat ya, disampaikan tertulis saja nanti.

**F-P. NASDEM (RICO SIA):**

Baik, terus satu lagi tadi terkait dengan apa yang Pak Plt. Dirjen sampaikan bahwa jangan panggil staf saya, panggil saya. Nah itu yang maksud saya supaya di, jangan Plt. lagi sekalian dirjen, irjennya itu Plt. Jadi ada apa-apa beliau bertanggung jawab atas, nah inilah senangnya kita lihat garis komando kan, anak buah saya *nggak* ada yang salah, saya yang salah gitu. Nah bagusnya lebih bagus sekalian dirjen begitu.

Terima kasih Pimpinan.

**PLT. DIRJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDM (LETJEN. TNI (MAR)  
(PURN) BAMBANG SUSWANTONO, S.H., M.H., N.TR.(HAN), CGCAE):**

Terima kasih, Pak, doanya, Pak.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM):**

Kok ada apa nih di balik ini semuanya.

**PLT. DIRJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDM (LETJEN. TNI (MAR)  
(PURN) BAMBANG SUSWANTONO, S.H., M.H., N.TR.(HAN), CGCAE):**

Pak, sebetulnya kami ini kan jabatan definitifnya kan irjen, Pak, kalau kita golongan tuh golongan Eselon 1 A Pak. Kalau kami turun ke dirjen berarti kan turun lagi, Pak, satu lagi, Pak, kami cukup, Pak, dengan adanya jabatan rangkap enggak apa-apa, Pak, yang penting apa SDM ini dapat kembali memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini, Pak.

Baik, terima kasih ya amin-amin.

Yang berikut Ibu Ratna Juwita, terima kasih atas apresiasinya pada Direktorat Jenderal Minerba. Di mana PNBP sudah mencapai 99,9% kalau enggak salah nih 224 triliun ini tahun, tanggal 12 Oktober kalau *nggak* salah Bu ya, ya 12 Oktober itu 224 triliun ya sudah 99,99% ya.

Kemudian kami juga berharap karena kami ini penghasil PNBP terbesar, Bu, tetapi perhatian kita, perhatian pemerintah kepada kita Bu barangkali masalah tunjangan kinerja juga perlu diperhatikan. Teman-teman kita yang di Kementerian Keuangan sudah 100%, kami masih 80% ya kami masih 80%, Bu, barangkali ini menjadi pertimbangan ya.

Kemudian kami juga sudah catat Ibu mengenai sistem lingkungan keselamatan kerja ya, perlu Satgas yang mengawasi masalah pembukaan lahan, memang ini juga sudah kita tekankan pada teman-teman kami di Inspektur Tambang terutama yang di tempat-tempat yang banyak menghasilkan tambang di Sulawesi Tenggara. Kalau *nggak* salah paling besar di Sulawesi Tenggara ada sekitar 50 orang atau barangkali momen masalah ini Pak Direktur Teknik bisa menambahkan masalah sistem pengawasan keselamatan kerja dan lingkungan.

Silakan.

**DIREKTUR TEKNIK KEMENTERIAN ESDM RI:**

Baik, izin Pak Dirjen.

Yang saya hormati Bapak Pimpinan Komisi VII, Ibu Ratna Juwita.

Izin menambahkan apa yang disampaikan Pak Dirjen, betul sekali, Bu, jadi kita punya mekanisme terhadap besaran bukaan lahan yang kita

selalu monitor ya. Jadi setiap tahun kami akan minta persetujuan kepada mereka terkait berapa lahan yang akan dibuka sesuai dengan tingkat produksi yang ditetapkan. Apabila mereka merealisasikan rencana bukaan lahan tersebut, tentunya implikasinya adalah terhadap program reklamasi yang harus mereka selesaikan karena jaminan yang ditempatkan berdasarkan FS yang disetujui itu adalah luasan bukaan lahan per tahun, sehingga kami di dalam proses penetapan untuk jaminan reklamasi itu per 5 tahun dan sesuai dengan rencana yang disetujui dalam FS.

Demikian Bu Ratna, terima kasih.

**PLT. DIRJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDM (LETJEN. TNI (MAR)  
(PURN) BAMBANG SUSWANTONO, S.H., M.H., N.TR.(HAN), CGCAE):**

Kemudian kami juga menambahkan.

**F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.):**

Pimpinan, izin interaktif Pimpinan.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-P. NASDEM):**

(Pembicara tanpa *mic*)

**F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.):**

Iya, terima kasih Pak Dirjen dan Pak Direktur Teknis tadi penjelasannya.

Yang pertama yang ingin saya tanyakan, Pak, Dirjen Minerba punya enggak ya datanya berapa presentasi kepatutan dan kepatuhan perusahaan-perusahaan tambang ini terhadap komitmen untuk ke reklamasi? Satu.

Yang kedua, menurut asumsi Bapak sebagai dirjen, inspektur yang kita miliki hari ini kan kalau *nggak* salah ESDM itu hanya di tingkatan provinsi ya, di kabupaten kan udah *nggak* ada gitu. Nah ini bagaimana efektivitasnya dengan pelaksanaan kinerja dan tugas yang dibebankan kepada Kementerian ESDM untuk pengawasan tersebut?

Terima kasih.

**PLT. DIRJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDM (LETJEN. TNI (MAR)  
(PURN) BAMBANG SUSWANTONO, S.H., M.H., N.TR.(HAN), CGCAE):**

Baik, terima kasih Bu.



Untuk evaluasi pada perusahaan-perusahaan yang berkegiatan dalam 1 tahun terutama masalah lingkungan dan reklamasi, ini ada catatannya di tempat Pak Sunindyo *monggo* dipaparkan.

**DIREKTUR TEKNIK KEMENTERIAN ESDM RI:**

Baik, terima kasih Pak Dirjen.

Baik Ibu Ratna, jadi terkait dengan reklamasi kami melakukan pengendalian, Bu, terhadap bukaan lahan melalui komitmen dari perusahaan-perusahaan yang saat ini kita berikan persetujuan rencana kerjanya. Berbicara mengenai statistik berdasarkan juga luasan bukaan lahan itu rata-rata setiap tahun itu komitmen penyelesaian kewajiban 100% reklamasi pelelangan itu berada di sekitar 7 ribu sampai 11 ribu hektar per tahun dan itu biasanya tercapai lebih dari target apabila memang ada pengajuan revisi RKAB untuk peningkatan produksi. Biasanya memang kami persyaratkan agar mereka tetap mendahulukan penyelesaian terhadap komitmen reklamasi tersebut.

Demikian, Bu.

**F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.):**

Izin Pimpinan, menurut kami ini sangat menarik ya, Pak. Berarti kan ada semacam kecenderungan mereka itu baru mau melaksanakan komitmen mereka tentang reklamasi itu setelah mereka ada pengajuan RKAB baru begitu, pertama itu. Berarti kalau menurut pemahaman kami Pimpinan, memang sepertinya ini belum ada sanksi yang sifatnya itu tegas dan mengikat begitu loh, kalau *nggak* salah itu kalau misalnya belum dilaksanakan hanya itu saja kalau pengajuan RKAB itu diperlambat atau *nggak* sanksi administratif yang lain. Padahal menurut kami ini adalah kesempatan yang baik untuk negara dalam memproteksi lingkungan.

Jadi kalau bisa untuk perusahaan-perusahaan yang sudah jelas tidak melaksanakan tugas reklamasinya ini ya jangan hanya diselesaikan lalu RKAB tetap dikeluarkan, tapi kalau bisa dilaksanakan penalti atau apa begitu loh, denda yang sangat besar sehingga mereka takut untuk mengulang ini kembali dan sekaligus menjadi *shock therapy* untuk perusahaan-perusahaan yang lain, mungkin begitu Pimpinan.

Terima kasih.

**DIREKTUR TEKNIK KEMENTERIAN ESDM RI:**

Izin interaktif Pimpinan.

Bu Ratna terima kasih sekali, memang ke depan memang ada beberapa perusahaan yang transisi ya ketika dulu kewenangan di provinsi dan kabupaten memang perlu kami tegakkan kembali melalui serah terima dengan provinsi, ini saat ini sedang berjalan.

Namun dalam konteks penegakan kewajiban reklamasi sudah ada contoh beberapa perusahaan yang kita berikan teguran hingga kita berikan sanksi pencabutan izin, Bu, dan itu sudah pernah terjadi di Maluku Utara karena mereka tidak segera menempatkan terhadap penetapan jaminan reklamasi yang sudah disetujui oleh Pak Menteri, itu akhirnya dicabut.

Demikian Pak Ketua, terima kasih.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM):**

Iya mungkin menambahkan dan mempertajam apa yang sampaikan Ibu Ratna, bahwa tata kelola pertambangan saya kira kita semuanya memang secara umum ESG ya tapi lebih spesifik lagi tentang lingkungan saya kira sama-sama sepakat, bahwa termasuk nanti bagaimana dia mengeluarkan berapa karbon yang dia dan seterusnya perhitungan-perhitungan karbon, termasuk energi apa yang dia gunakan menjadi perhatian kita semuanya kan karena dalam konteks lebih besar semuanya sepakat, semuanya jangan sampai justru memperbesar *climate change* dan sebagainya.

Saya kira seluruh sektor sekarang orientasinya ke sana, termasuk menuju *net-zero emission* dunia pertambangan dan industri, ini juga menjadi sector yang menjadi perhatian kita.

Saya kira tambahan itu mempertajam apa yang disampaikan dengan Ibu Ratna tadi.

**PLT. DIRJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDM (LETJEN. TNI (MAR) (PURN) BAMBANG SUSWANTONO, S.H., M.H., N.TR.(HAN), CGCAE):**

Barangkali ditambahkan, Pak, dari Direktur Program untuk masalah jaminan reklamasi.

**DIREKTUR PROGRAM KEMENTERIAN ESDM RI:**

Izin Pimpinan, Bu Ratna, Pak Dirjen.

Sebetulnya kalau misalnya kita lihat, Pak, di dalam Undang-undang 3 Tahun 2020 yang bersama-sama disusun dengan Komisi VII, sebetulnya terkait dengan reklamasi paska tambang ini apabila tidak melaksanakan reklamasi dan atau paska tambang dan tidak menempatkan jaminan reklamasi dan atau paska tambang yang di Pasal 161 b, "setiap orang yang IUP atau IUPK dan tidak melaksanakan reklamasi", jadi dicabut dan tidak melaksanakan reklamasi paska tambang atau penempatan jaminan reklamasi ini kena hukuman pidana 5 tahun dan denda sebanyak-banyaknya 100 miliar.

Jadi saya rasa ini cukup maju dengan dulu pembahasan dengan Komisi VII ya.

Mungkin demikian, Bu, terima kasih.

**PLT. DIRJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDM (LETJEN. TNI (MAR) (PURN) BAMBANG SUSWANTONO, S.H., M.H., N.TR.(HAN), CGCAE):**

Kemudian kami lanjutkan Bapak Pimpinan, masih kepada Bu Ratna Juwita tadi tentang peran pemberdayaan kepada masyarakat di sekitar tambang yang terdampak. Memang kami melihat ada beberapa perusahaan-perusahaan termasuk perusahaan besar, Pak, sudah ikut berperan dalam pemberdayaan masyarakat. Yang terakhir kemarin masalah stunting, Pak, ada beberapa tempat yang dilaksanakan oleh teman-teman kami atau mungkin para pelaku usaha. Contoh kemarin dari PT Vale ya, Pak ya, kalau *nggak* salah ya, PT Vale dan itu yang akan kami sampaikan kepada para pengusaha yang lain, para pelaku usaha untuk bisa ikut berperan pemberdayaan masyarakat untuk membantu pemerintah dalam masalah stunting.

Kemudian yang berikut, *oke* ada tambahan dari Direktur Batubara.

*Monggo* silakan.

**DIREKTUR BATUBARA KEMENTERIAN ESDM RI:**

Izin Pak Ketua menambahkan, izin Bu Ratna.

Jadi terkait dengan program pengembangan pemberdayaan masyarakat atau sebenarnya mereka wajib CSR berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, tapi berdasarkan regulasi kami Undang-Undang 3/2020, PP 96/2021 dia wajib menyampaikan rencana program pengembangan pemberdayaan masyarakat di dalam RKAB-nya dan rencana pengembangan PPM tersebut harus mengacu pada rencana induk PPM-nya yang disusun oleh provinsi berdasarkan 8 pilar. Contohnya kontribusi di tahun 2023 untuk sektor batubara saja rencana PPM 2023 adalah 648 miliar sampai dengan triwulan 2 itu telah tercapai 156 miliar 500 juta sekian itu triwulan 2 karena triwulan 3 sedang dilakukan rekonsiliasi atau direkap datanya, itu baru batubara belum mineral.

Demikian Pak Ketua, namun itu di luar CSR, CSR-nya ada sendiri juga. Demikian Bu Ratna.

**PLT. DIRJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDM (LETJEN. TNI (MAR) (PURN) BAMBANG SUSWANTONO, S.H., M.H., N.TR.(HAN), CGCAE):**

Terima kasih Pak Pimpinan, kami lanjutkan.

Berikut dari Pak Sartono, beliau menyampaikan masalah kesepakatan atau penguatan payung hukum terutama bagi para ASN yang

sering dipanggil aparat penegak hukum dan ini mengganggu dari kinerja rekan-rekan kami yang di Direktorat Jenderal Minerba dan kami juga terima kasih kepada Bapak Sartono yang menyoroti masalah perlunya atau pentingnya pertumbuhan PNBPN yang cukup tinggi karena memang dari angka perolehan PNBPN di negara kita dari sektor ESDM yang cukup besar hamper 300 triliun. Oleh karena itu ini betul-betul harus kita amankan supaya untuk mendukung pemerintah dalam pembangunan dan kami setuju untuk hal ini ada pengawasan ekstra, Pak, terima kasih, Pak.

Yang berikut dari Bapak Nasril Bahar, untuk meng-*update* RKAB batubara selama tahun 2023 dan barangkali dari teman-teman kami, Pak, akan menjelaskan tentang progres per bulannya Pak, proses RKAB 2023.

Saya persilakan Bu Lana.

**DIREKTUR BATUBARA KEMENTERIAN ESDM RI (LANA):**

Baik, izin Pak Ketua, izin Pak Nasril.

Izin memaparkan resume persetujuan yang kita apa hitung berdasarkan per bulan, di Desember 2022 untuk RKAB tahun 2023 telah kami keluarkan 654 dokumen atau 654 perusahaan, di Januari 2023 ada 193 perusahaan, Februari 2023 ada 43 perusahaan, kenapa ada setiap bulan? Karena memang ada perusahaan-perusahaan yang baru selesai dengan kendala-kendalanya seperti halnya baru mendapatkan IPPKH, baru mendapatkan dokumen lingkungan, baru di tengah-tengah jalan mereka menyampaikan RKAB atau juga perusahaan-perusahaan yang paska pencabutan yang kemudian dipulihkan oleh BKPM setelah menjalankan kewajiban finansialnya memasukkan RKAB. Jadi sampai dengan November 2023 demikian.

Demikian Pak Nasril.

**F-PAN (H. NASRIL BAHAR, SE):**

Izin Pimpinan.

RKAB yang terbit misalnya Oktober, November itu kan berakhir di Desember ya, Pak, Bu, kelanjutannya apa langkah mereka untuk itu?

**DIREKTUR BATUBARA KEMENTERIAN ESDM RI (LANA):**

Mereka biasanya nanti akan menyampaikan RKAB 2024 ya, Pak ya, tapi di Oktober itu paling tidak dia mempersiapkan konstruksinya untuk apa namanya melakukan kegiatan di 2024 begitu, Pak, *land clearing* atau apa begitu, hal-hal yang mungkin kalau masih dengan November disetujui tidak melakukan penambangan atau menjual stok yang sudah ada, seperti itu, Pak.

**F-PAN (H. NASRIL BAHAR, SE):**

Mereka bisa *cary over* nggak?

**DIREKTUR BATUBARA KEMENTERIAN ESDM RI (LANA):**

*Nggak* bisa, Pak, sampai Desember.

**F-PAN (H. NASRIL BAHAR, SE):**

*Nggak* bisa, ya, selanjutnya dari mineral.

**DIREKTUR MINERAL KEMENTERIAN ESDM RI:**

Mohon izin Pimpinan, terima kasih Pak Nasril.

Untuk mineral ini mulai Januari 2023 itu beda dengan batubara, Pak, e-RKAB-nya kena *hack*, jadi dilakukan secara manual.

**F-PAN (H. NASRIL BAHAR, SE):**

Izin Pimpinan, *nggak* bisa ditayangkan, Pak. Januari berapa, ini berapa, kalau kami lihat progress dari batubara cukup bagus ya. Di mana di penghujung tahun itu hanya 2, 9, 4 bagaimana tentang mineral.

**DIREKTUR MINERAL KEMENTERIAN ESDM RI:**

Ooh mohon maaf, Pak, jadi yang tadi itu memang dari pengambilan dari e-RKAB itu secara apa namanya manual, Pak, kalau yang mineral karena memang masih manual didatanya ini hanya jumlah total, Pak, tidak bulanan.

Jadi sampai Juli itu 444, Pak, yang disetujui, jadi pengajuannya 757. Jadi selama Juli ini ada *pending*, Pak, nah baru November ini ada proses yang revisi maupun yang pengajuan itu 200, Pak. Nah kenapa RKAB ini masih berproses, jadi RKAB itu Pak ada yang disetujui dengan produksi juga mereka itu mengajukan RKAB tanpa produksi, Pak, karena proses konstruksi memang juga ada yang eksplorasi, RKAB eksplorasi.

Demikian, Pak.

**F-PAN (H. NASRIL BAHAR, SE):**

Iya ini kan proses persetujuannya itu kan 187 ya, Pak, November ya?

**DIREKTUR MINERAL KEMENTERIAN ESDM RI:**

6 November.

**F-PAN (H. NASRIL BAHAR, SE):**

Artinya itu kan yang berproses dari Januari kan, Pak.

**DIREKTUR MINERAL KEMENTERIAN ESDM RI:**

Yang *pending*, Pak.

**F-PAN (H. NASRIL BAHAR, SE):**

Iya yang *pending*, kami melihat progres di bulan ke bulan aja, Pak, enggak bisa kelihatan.

**DIREKTUR MINERAL KEMENTERIAN ESDM RI:**

Mohon maaf nanti barangkali disampaikan, Pak.

**F-PAN (H. NASRIL BAHAR, SE):**

Iya saya minta inilah jawaban yang kalau *nggak* bisa tertulis *by* WA aja lah.

**PLT. DIRJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDM (LETJEN. TNI (MAR) (PUKN) BAMBANG SUSWANTONO, S.H., M.H., N.TR.(HAN), CGCAE):**

Izin, Pak, jadi kami menambahkan, Pak.

Memang terus terang dari teman-teman Minerba juga dihadapkan dengan permasalahan yang kasus Mandiodo itu, Pak, sehingga begitu kasus Mandiodo mencuat itu yang sudah disetujui 444, Pak, yang lainnya masih belum dikerjakan. Otomatis teman-teman kami menghadapi permasalahan itu, mohon maaf teman-teman kami banyak yang tiarap, Pak, karena takut akan ada panggilan lagi dari pengembangan kasus itu. Dari mulai Juli, Agustus, September, kemudian bulan kemarin baru kami kumpulkan lagi teman-teman kami untuk kita ajak bersama-sama menghadapi RKAB tahun 2023 untuk re-evaluasi lagi. Itu diantara lain 200 proses persetujuan, yang mana dalam proses itu saat ini yang sudah disetujui berapa? 13 ya, 13 yang masih 187 yang hari ini sedang dalam proses persetujuan. Mudah-mudahan sudah final, Pak, dalam berapa hari ke depan sudah kita bisa putuskan. Ini sudah dalam proses evaluasi, Pak, yang 187 ini, sudah, tinggal diputuskan saja.

Demikian, Pak.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM):**

Baiklah, Bapak/Ibu sekalian.

Demikian tadi dari apa yang disampaikan oleh Dirjen Minerba berbagai aspek menyangkut tentang RKAB dan yang lain-lain. Saya kira

sudah cukup dan sekarang kita coba simak draft kesimpulan.

Baiklah, Bapak/Ibu sekalian.

Mari kita cermati draf kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Dirjen, maaf, Plt Diren Minerba Kementerian ESDM Republik Indonesia, Senin 6 November 2023.

1. Komisi VII DPR RI sepakat dengan Plt. Dirjen Minerba Kementerian ESDM agar Kementerian ESDM melakukan *memorandum of understanding* atau MoU dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk pendampingan prosedur guna meningkatkan kelancaran tata kelola pertambangan dalam rangka meningkatkan pendapatan negara.

Begitu kalimatnya, Pak Midel setuju, Pak Nasril atau Mbak Ratna? Cukup? Cukup ya.

**F-GERINDRA (BAMBANG HARYADI, S.E./WAKIL KETUA KOMISI VII):**

Tapi ini kerjasama antar ini ya, Pak, antar institusi dan akan ditindaklanjuti di tingkatan Eselon 1 kan. Jadi *entar* Pak Dirjen dengan pihak Kejaksaan itu Jam-nya yang Jam siapa yang ditunjuk oleh Pak JA dengan Polri, misalnya dengan Kabareskrim atau siapalah itu. Jadi ini kerja sama antar lembaga gitu loh.

**PLT. DIRJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDM (LETJEN. TNI (MAR) (PURN) BAMBANG SUSWANTONO, S.H., M.H., N.TR.(HAN), CGCAE):**

Izin, Pak, satu hal, Pak.

Untuk masalah MoU, Pak, dengan Kepolisian kita sudah, Pak, kemudian MoU dengan masalah lelang juga sudah dengan Kejaksaan, dalam ini Jamdatun, Pak, tinggal kami laksanakan saja yang lain, Pak.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM):**

Tapi yang pertambangan belum, Pak.

**F-GERINDRA (BAMBANG HARYADI, S.E./WAKIL KETUA KOMISI VII):**

Yang pertambangan mungkin belum yang khusus RKAB dan Modi kan belum, jadi ini terkait itu, Pak, gitu, khusus pertambangan. Mungkin kalau secara general Pak Menteri dengan Polri mau ini kan, jadi yang spesifik, Pak. Spesifik terkait perizinan di Minerba aja gitu, ya. Jadi ini pendampingan terhadap pendampingan prosedur, ya, kita garis bawahi, ya, bukan pendampingan teknis. Pendampingan bahwa prosedur itu sudah memenuhi kaidah hukum, dalam hal ini didampingi oleh pengacara negara yaitu Kejaksaan dan juga APH-nya Kepolisian gitu, Pak. Agar mungkin ini

agar Kementerian menindaklanjuti mungkin MoU, ya, kan, menindak karena sudah ada MoU, kan. Menindaklanjuti MoU untuk melakukan pendampingan prosedur di sektor perizinan, ya, sektor perizinan prosedur aja, ya, Pak, ya, sektor, yaudah sektor ini aja prosedur aja.

Ininya berarti *entar* tinggal Pak Dirjen menindaklanjuti dengan bersurat dengan Kejaksaan Agung kan dan ini terserah Kejaksaan Agung tunjuk siapa, ya, terserah ini pimpinan lembaganya gitu untuk melakukan semacam kayak apa, ya, Pak, tapi mereka bukan ikut di dalam teknis loh, Pak, bukan yang tadi Pak Dirjen sampaikan hadir di dalam, *nggak*, dia prosedurnya aja sama seperti dulu mungkin di sektor pengadaan barang, ya, TP4, kan. Jadi TP4 itu memang dibolehkan untuk pekerjaan strategis, tidak seluruhnya. Nah ini kan yang strategis, tata kelola, soalnya menyangkut PSN, kan, gitu loh.

Jadi saya pikir itu, Pak, jadi kerja sama sifatnya, kerja sama bahwa prosedur. Jadi intinya kalau ada antar laporan atau panggilan dari tingkatan-tingkatan di bawah tinggal bahwa kami sudah inilah dari lembaga terkait aja disampaikan gitu dan juga ini untuk menguatkan moral teman-teman ESDM yang sekarang posisinya enggak tahu ininya, apa yang dia jalankan sudah benar atau tidak benar gitu loh, tapi kalau ada pendampingan begini kan mereka merasa yakin bahwa kami sudah didampingi lah, apa yang kita sampaikan sudah sesuai gitu loh gitu, Pak.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM):**

Silakan, Pak.

**F-PAN (H. NASRIL BAHAR, SE):**

Iya apa yang disampaikan oleh draf kesimpulan sementara ini, ya, kami dapat memahami, tapi menurut catatan kami, ya, untuk APH jangan terlalu masuk dalam persoalan-persoalan teknis ya, jangan terlalu masuk dalam persoalan teknis, ya. Kalau memang prosedur kan sudah ada, ada tata aturan, ada Irjen, ya, kan, kalau APH kan tempat pelaporan tapi bukan sebagai pendamping dalam persoalan teknis. Kalau APH yang saya khawatirkan APH terlalu jauh masuk dalam persoalan teknis, ya, saya pikir tidak ada kemerdekaan bagi kementerian untuk melakukan sebuah kebijakan, itu catatan kami Pimpinan.

**F-PD (SARTONO, S.E., M.M.):**

Pimpinan, Sartono Pimpinan.

Yang jelas kan kita memberikan dukungan politik, ya, agar ini berjalan gitu, ini sudah ada MoU, sudah ada kesepakatan, tapi realitas di dalam praktiknya di lapangan nyatanya juga masih terjadi itu. Jadi bagaimana ini diadakan suatu evaluasi kesepakatan itu, saya di tahun 2019 menghadiri dengan Pak Ketua juga kan waktu itu tentang distribusi subsidi bahan bakar begitu, tapi juga di lapangan masih terjadi apa tidak

sesuai dengan harapan begitu.

Nah ini kita ingatkan kembali dari Komisi VII agar semua apa sistem itu berjalan pada titik edarnya, kurang lebih begitu, kan ini kan karena terlalu banyak yang intervensi jadi apa istilahnya *njlimet* gitu, di satu sisi menjadi korban ini *diponggal-panggil* terus nih, teman-teman kita ini. Jadi akhirnya enggan juga gitu, mendingan saya tidak di urusan di bagian inilah begitu, yang terjadi kan begitu suara-suara di lapangan. Fakta realitasnya itu temuan di lapangan begitu, nah ini bagaimana untuk mengurai permasalahan itu tidak terjadi ke depannya.

Untuk itu Komisi VII bersepakat untuk memberikan dukungan politiklah supaya itu terjadi untuk apa permasalahan-permasalahan yang selama ini dialami itu bisa berjalan dengan baik begitu dalam rangka untuk, tentu peningkatan pendapatan negara dari sektor tambang ini.

Kurang lebih demikian Pimpinan, terima kasih.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM):**

Menurut saya ini kalimat ini juga sudah oke kok, ya, Komisi VII DPR RI bersepakat dengan Plt. Dirjen Minerba Kementerian ESDM Republik Indonesia agar Kementerian ESDM Republik Indonesia menindaklanjuti MoU dengan Kepolisian RI dan Kejaksaan RI untuk melakukan pendampingan.

Nah ini kan tindak lanjut dari MoU itu adalah menyusun sebuah tata kelola pendampingan prosedur guna meningkat, guna meningkatkan kelancaran tata kelola pertambangan dalam rangka peningkatan. Sudah saya kira oke, menurut saya sih.

**F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.):**

Izin Pimpinan, kalau substansi kita sepakat.

Cuman saya ingin mengingatkan TA ya Komisi VII itu institusi, berarti ketemunya sama institusi. Ini yang disebut masih perorangan, harusnya diganti Ditjen Minerba

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM):**

Direktorat Jenderal, ya, bukan Plt, betul.

**F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.):**

Iya institusi sama institus, Mas, iya, kalau tadi Pak Nasril memiliki kekhawatiran saya bisa memahami Pimpinan cuman kan, jadi gini Pak Nasril ini seperti bentuk keprihatinan kita lah supaya teman-teman APH itu mulai beralih ke tindakan preventif gitu. Selama ini kan mereka terlalu represif kepada teman-teman ASN ini, sehingga kita berharap dengan

adanya himbauan semacam ini mereka bisa lebih bersahabat lah begitu.

Terima kasih.

**F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E):**

Iya Pimpinan, boleh, ya.

Saya tolong dimaknai pendampingan prosedur itu maknanya apa? Mereka ingin bekerja, mereka ingin bekerja dengan benar, kan begitu, ya. Mereka bekerja dengan prosedur mereka, punya irjen, ya, apakah ini harus didampingi pendampingan itu oleh APH setiap saat?

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM):**

Coba Pak Bambang.

**F-GERINDRA (BAMBANG HARYADI, S.E./WAKIL KETUA KOMISI VII):**

Salah satu yang jadi objek pemeriksaan itu adalah selalu kan kesalahan prosedur, kan. Oleh APH mereka oh ini salah, ini harus dilakukan begini. Nah hal itulah yang membuat kita bahwa kalau teknis mereka, mereka yang kuasai, tapi APH selalu ini kesalahan prosedur itu yang **mengakibatkan terjadi**, dianggap terjadinya tindak pidana, kan. Nah itu yang kita payungi dalam hal ini, minimal apa yang dilakukan teman-teman Minerba, kasihan nih untung ada Pak Dirjen yang paling yang berani nih, saya aja yang dipanggil kan kira-kira gitu loh. Tapi kalau staf-staf itu dapat panggilan berapa lembar *nggak* hanya satu, saya pernah melihat soalnya. Ada dipanggil Kajati Sultra, habis itu Polda Metro Jaya, dipanggil juga Kejari Bombana. Saya bilang buset, saya saya mikir kan gimana mereka mau pulang ke rumahnya, baru pulang ini menyiapkan data besoknya.

Nah hal-hal itulah yang saya tanya kenapa Anda dipanggil? Ya mereka menanyakan prosedur, mereka selalu bertanya prosedur. Nah hal inilah yang membuat biar ada kepastian, jadi ibarat melegitimasi prosedur itu sudah sesuai. Jadi kalau ada panggilan, Pak, ini prosedur sudah **di-review** oleh kepolisian dan pihak ini, apalagi kami salahnya, kan, masa kami sudah minta caranya ini sudah benar *nggak* gitu loh, kan, dan Jaksa Agung itu menurut undang-undang pengacara negara. Jadi mereka ini petugas-petugas negara, ya, bukan petugas partai, Pak, petugas negara, kan. Petugas negara ini harus benar-benar mendapat kepastian karena mereka bekerja untuk negara gitu.

**ANGGOTA:**

Iya Pimpinan (**suara rekaman terputus 2:09:15-2:09:51**)

**F-GERINDRA (BAMBANG HARYADI, S.E./WAKIL KETUA KOMISI VII):**



Tadi kita sepakati bahwa prosedur itu tidak parsial lah, tidak satu, tapi secara global terkait mineral ini, kan. Jadi prosedur itu dijalankan sesuai kesepakatan MoU itu. *Nggak*, mereka tidak satu PT minta MoU, 1 PT, *nggak*, tapi secara SOP yang akan dijalani ini sudah melalui kesepakatan bersama, udah. Jadi ketika ada panggilan dari teman-teman di daerah bahwa prosedur kami jalankan ini sesuai ketentuan dari kami bertiga, sudah gitu. Tidak bukan prosedur satu-satu, bukan satu RKAB minta MoU, *nggak*, tapi sistemnya secara global bahwa *review* itu dilakukan *review* global gitu.

Gitu, Bang.

**F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.):**

Izin, izin Pimpinan (**suara rekaman terputus 2:10:41-2:11:25**)

**F-GERINDRA (BAMBANG HARYADI, S.E./WAKIL KETUA KOMISI VII):**

Jadi intinya kan disampaikan oleh Pak Bambang Pattijaya sifatnya sementara, kan, selama sistem itu kayak model e ini belum berjalan dengan baik, ini punya Pak Yose aja sudah di-*take down* kan udah ada apa ada virus, ya, yang masuk mungkin, ya, Pak, ya, kan *hacker*. Akhirnya kan bermasalah semua dan juga masalah moral, moral teman-teman di Minerba ini lagi *down-down*-nya sekarang, kan. Bahkan *nggak* tahu benar *nggak*, ya, Pak Dirjen bahkan ada sudah banyak yang minta pindah, kan, mengundurkan diri. Nah ini yang rugi siapa? Semua, kan, negara rugi, kan.

Jadi ini sifatnya sementara Bang, sampai sistem itu sudah berjalan, kalau sudah berjalan enggak ada lagi lah, kan.

**F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.):**

Izin, izin Pimpinan konkrit.

Melakukan pendampingan selama proses penyusunan prosedur guna meningkatkan kelancaran tata kelola pertambangan dalam rangka meningkatkan pendapatan negara, dari klausul tersebut kami berharap karena ini sifatnya *temporary* kalau sudah jalan bagus, selesai. Jadi, ya, hanya pada saat penyusunan proses tersebut saja, satu.

Saya secara kebatinan bisa memahami apa yang dikhawatirkan oleh Pak Nasril Bahar, tapi mungkin begini Pak Nasril mari kita sama-sama berhusnuzan saja lah bahwa APH itu bukan pagar makan tanaman begitu. Jadi kalau mereka terlibat dari awal penyusunan prosedur tersebut mereka juga akan mengawal dengan baik realisasi pelaksanaannya begitu saja Pak Nasril.

Saya mengusulkan untuk melakukan pendampingan selama proses penyusunan prosedur, saya mengusulkan demikian Bapak Pimpinan.

Betul, jadi saat prosedur itu sudah selesai maka menurut pemahaman kami selesai juga MoU dengan pihak-pihak APH tersebut gitu.

**DIREKTUR MINERAL KEMENTERIAN ESDM RI:**

Izin, izin Pimpinan, Pak Dirjen, Bapak/Ibu sekalian

Yang kami lakukan di lelang memang ada panitia, ada tim menjamin mutu, tapi juga ada pendampingan dari Kejaksaan Agung dalam hal ini Jamdatun. Nah fungsinya ada pendampingan bahwa semua prosedur dan SOP yang dilakukan pada saat lelang itu sesuai prosedur. Misalnya pada saat lelang dilakukan secara elektronik bahwa itu dilakukan betul secara elektronik, tidak ada permainan dan dalam aplikasi itu tidak ada intervensi dari pihak-pihak tertentu, betul-betul itu sudah betul. Pada saat penilaian, pada saat apa itu namanya pleno itu betul-betul dilakukan. Nah dengan demikian pada saat nanti suatu saat itu tidak akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

Mungkin seperti itu Bu Ratna.

Jadi kalau menurut saya kalau secara prosedurnya kami sudah ada, Bu Ratna, tapi kalau pendampingan terkait dengan pelaksanaan prosedur itu ya memang kami, *oke* iya.

**F-GERINDRA (BAMBANG HARYADI, S.E./WAKIL KETUA KOMISI VII):**

Tadi ceritakan terkait lelang-lelang itu, apakah itu merasa terintervensi, Pak Tri? Malah merasa bahwa apa yang dilakukan sudah sesuai, dibantu, kan, dan mereka enggak masuk di teknis, kan, nah itu.

**F-PAN (H. NASRIL BAHAR, SE):**

Iya Pimpinan, kalau begitu pendampingan pelaksanaan, prosedurnya kan sudah ada. Jadi *nggak* perlu lagi pakai kata-kata prosedur di situ.

Saya kembali kepada ini, apakah draf ini diinginkan oleh kementerian supaya untuk memperlancar kerja, saya tanya dulu kepada ini kepada.

**PLT. DIRJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDM (LETJEN. TNI (MAR) (PURN) BAMBANG SUSWANTONO, S.H., M.H., N.TR.(HAN), CGCAE):**

Yang pertama dari kami, Pak, tidak ada yang kami tutup-tutupi, Pak. Kalau dari aparat penegak hukum hadir bersama-sama kami, kami tambah senang, Pak, karena memang di sisi lain teman-teman kami apabila ada pemanggilan-pemanggilan dari aparat tenaga hukum, baik Kepolisian, baik Kejaksaan itu kami kadang-kadang kita harus mengadu ke siapa ini. Nah kalau ada kawan-kawan kami yang ikut mendampingi ya mohonlah diklarifikasilah, tolonglah bantu kami.

Betul, betul, Pak.

**F-GERINDRA (BAMBANG HARYADI, S.E./WAKIL KETUA KOMISI VII):**

Berarti bahwa Kementerian apa Dirjen Minerba *open*, gua *nggak* main-main nih, ya udah masuk aja, ayo awasin sekalian, kan gitu, kan kira-kira gitu, ya, Pak, ya.

**PLT. DIRJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDM (LETJEN. TNI (MAR) (PURN) BAMBANG SUSWANTONO, S.H., M.H., N.TR.(HAN), CGCAE):**

Karena semuanya demi kelancaran tata kelola pertambangan yang baik, Pak, tapi mohon maaf, Pak, tapi, Pak mohon maaf, Pak, bukan berarti kami tidak mampu, Pak. Kami akan berterima kasih apabila ada teman-teman membantu.

Terima kasih.

**F-GERINDRA (BAMBANG HARYADI, S.E./WAKIL KETUA KOMISI VII):**

Saya yakin kalau Pak Dirjen merasa bahwa, udah kita sesuai benar, bahkan tadi kan disampaikan Pak Dirjen, saya aja yang panggil, tapi kan mental Pak Dirjen ini tentara belum sama sama yang di bawah. Dapat surat klarifikasi aja udah, kadang itu mereka, Pak, mules-mules, Pak, gitu kalau yang *nggak* biasa, benar *nggak*, Pak? Bahkan ada yang sampai apa sakit kan tuh. Makanya tidak gampang menjadi Direktur Mineral sama Direktur Batubara.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM):**

Baik, saya kira *clear* ya tapi inilah pentingnya kita berdialog kayak begini. Kita uji betul-betul tentang manfaat dan mudharatnya kan begitu.

Baiklah poin 1 setuju ya?

**(RAPAT: SETUJU)**  
**(KETOK PALU 1 KALI)**

- 2 Komisi VII DPR RI meminta Dirjen Minerba Kementerian ESDM untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi VII dan disampaikan paling lambat tanggal 13 November.

Setuju Bapak-Ibu sekalian, ya?

**(RAPAT: SETUJU)**  
**(KETOK PALU 1 KALI)**

Baiklah, hari ini memang kesimpulan kita adalah fokus.

**F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):**

Izin Ketua, memang pertanyaan saran saya yang terakhir tadi kepada Pak Dirjen dan kawan-kawan tidak perlu dijawab, tapi tolong dibawakan evaluasi tahunannya Pak. *Nggak* perlu tertulis Pak, ketika mereka (suara tidak jelas 2:18:41) perlu *nggak* kita evaluasi di dalam RKAB 3 tahun itu, iya.

**DIREKTUR BATUBARA KEMENTERIAN ESDM RI:**

Izin menambahkan Pak Ketua, Pak Plt.

Jadi tadi itu yang ketinggalan terjawab, jadi kami memang buat 3 tahunan, Pak, tetapi di dalam tiap tahun. Dalam dokumen 3 tahun itu *ter-breakdown* per tahunnya dia akan melakukan apa, terinci per tahunnya dan dalam setiap periode tahunan itu juga ada mekanisme pengawasan, Pak. Mekanisme pengawasan secara administratif dan teknis ke lapangan. Jadi kalau ada hal-hal dari hasil pengawasan itu yang tidak sesuai dengan RKAB-nya, tentunya ada sanksi-sanksi yang diberikan kepada perusahaan yang menjadi penilaian untuk pemberi kinerja di tahun berikutnya, begitu, tapi kalau di dalam pengawasannya tidak ada masalah, artinya tidak perlu lagi kita melakukan evaluasi lagi di tahun-tahun, setiap tahunnya, karena kan sudah dibuat 3 tahun dengan catatan supaya memudahkan atau kondusifnya berusaha.

**F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):**

Iya saya sepakat memudahkan administratif secara 3 tahun, tapi dengan catatan, ya, Kementerian harus mengevaluasinya tahun per tahun, ya, dan memberikan sanksi. Jika tahun mau masuki tahun kedua jika ada yang fatal itu bisa dicabut 3 tahun itu.

**DIREKTUR BATUBARA KEMENTERIAN ESDM RI:**

Ada, Pak, sanksinya sanksi administratif, mulai dari peringatan secara tertulis, penghentian sementara sampai pencabutan, Pak.

**F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):**

Sampai pengurangan RKAB dan sebagainya.

**DIREKTUR MINERAL KEMENTERIAN ESDM RI:**

Iya.

**F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):**

Tetap ada setahun, setahun evaluasi.

**DIREKTUR MINERAL KEMENTERIAN ESDM RI:**

Ada setiap tahun ada pengawasan, Pak, dari pejabat dan juga Inspektur Tambang.

**F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):**

Iya catatan kami jangan sempat kita, ya, mengabaikan, membiarkan jika terjadi kesalahan.

**DIREKTUR MINERAL KEMENTERIAN ESDM RI:**

Dan tiap dalam 1 tahun itu ada laporan bulanan, laporan triwulan, Pak.

**F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):**

Oke, terima kasih.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM):**

Iya, saya kira cukup Bapak/Ibu sekalian.

Kita sungguh luar biasa hari ini, kita rapat demikian intens mungkin nanti rapat selanjutnya kita juga fokus kepada perlunya mencegah berbagai praktik-praktik ilegal, sehingga secara kelembagaan sebagaimana tadi kita bahas secara informal memerlukan apa semacam satgas-satgas tertentu nanti di kesempatan lain.

Baiklah, Bapak/Ibu sekalian.

Dengan demikian Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Plt. Dirjen Minerba Kementerian ESDM dengan mengucapkan syukur *alhamdulillah* saya nyatakan ditutup.

*Billahittaufik walhidayah,  
Wassalammu'alaikum warahmatilahi wabarakatuh.*

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.08 WIB)  
(KETOK PALU 3 KALI)**

a.n. KETUA RAPAT  
SEKRETARIS RAPAT,

Dwiyanti, S.Sos.  
NIP. 196903131990032002

